



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI BUMN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 5 (Lima)
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
Waktu : Pukul 11.22 s.d. 15.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I Lt. 1,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PDIP)
Acara : Pembahasan terkait:
1. Kinerja BUMN;
2. Progres Program Restrukturasi BUMN;
3. Perubahan Peruntukan PMN PT. Utama Karya
Tahun Anggaran 2024 Periode I;
4. Konsultasi Rencana Privatisasi/*Right Issue* PT.
Wijaya Karya (Persero) Tbk; dan
5. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
30 dari 55 orang Anggota, dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDIP)**
10 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Suryo Sulisto
 3. Prof. Assc. Dr. Darmadi Durianto, S.E.,
M.B.A.
 4. Rieke Diah Pitaloka
 5. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
 6. Sonny T. Danaparamita
 7. Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus, M.A.
 8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 9. H. Mufti A.N. Anam
 10. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

- 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PG)**
4 dari 8 orang Anggota
 1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
 2. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 3. Nusron Wahid
 4. Drs. H. Dadang S. Muchtar

- 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)**
6 dari 8 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. M. Husni, S.E., M.M.
 3. Khilmi
 4. M. Husein Fadlulloh, B. Bus., M.M., MBA.
 5. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
 6. Mulan Jameela

- 4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)**
2 dari 6 orang Anggota
 1. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
 2. H. Subardi, S.H., M.H.

- 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**
1 dari 6 orang Anggota
 1. Faisol Riza, S.S.

- 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Muslim, SHI., M.M.
 3. Hj. Melani Leimena Suharli
 4. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom, M.Sc.

- 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**
1 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Nevi Zuairina

- 8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**
2 dari 4 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih
 2. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

0 dari 2 orang Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN:

1. Menteri BUMN RI ((Dr. H. Erick Thohir, B.A., M.B.A.)
2. Deputi Bid. Hukum dan PUU (Robertus Billitea)
3. Deputi Bid. KMR Kemen BUMN (Nawal Nely)
4. Staf Khusus III BUMN (Arya Sinulingga)
5. Direktur Utama PT Waskita Karya (Muhammad Hanugroho)
6. Direktur Utama PT Hutama Karya (Budi Harto):
7. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Agung Budi Waskito, S.T.,M.Tech.):

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Segera kita mulai rapat pada pagi hari ini, eh siang hari ini *ding*.

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Republik Indonesia, Masa Sidang ke IV Tahun 2023-2024. Selasa, 15 Maret 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

**Yang terhormat Pimpinan, dan
Kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Menteri
BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir,
beserta seluruh jajarannya,**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Republik Indonesia, pada hari ini di bulan Ramadan dan dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Bapak-Ibu, Hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI, rapat kerja hari ini telah dihadiri 17 anggota dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI yang terdiri dari 6 fraksi, ada anggota 17 izin. Dengan demikian, kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 276 ayat (1), maka dengan keinginan kita untuk terus berharap BUMN merupa, yang merupakan sebagai badan usaha yang sangat vital bagi jalannya peran bangsa kita dan tentunya sesuai dengan amanat konstitusi bahwa BUMN tidak hanya keinginan kita untuk mendapatkan *benefit* korporasi atau keuntungan korporasi, tapi juga ada *benefit* untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat saya buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.22 WIB)

Bapak-Ibu dan Saudara sekalian,

Kita sepakati dulu, rapat akan kita akhiri pada pukul 13.00, ya.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini dengan agenda pembahasan kita, kawan-kawan, yang terkait dengan kinerja. Ini *lap* terakhir kita di tahun 2024, saya ucapkan selamat yang kemungkinan akan kembali ke DPR, kemudian yang masih harus menunggu perhitungan, kami bisa sangat memahami, tapi saya apresiasi masih ikut rapat hari ini.

Kemudian agenda kedua, Progres Program Restrukturisasi BUMN. Kemudian agenda ketiga, Perubahan Peruntukan Penyertaan Modal Negara Utama Karya Tahun Anggaran 2024 periode I. Keempat, ada Konsultasi Rencana Privatisasi atau *Right Issue* PT Wijaya Karya Tbk, dan tentunya lain-lain, bisa setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu dan Hadirin yang kami muliakan,

Seperti yang kita ketahui, BUMN memiliki peran yang sangat vital bagi negara Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan negara, tentunya tangan itu atasnya ada kepala, dalam rangka menjalankan misi negara melalui mekanisme usaha dengan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, selain mencari keuntungan, BUMN juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran masyarakat, serta perkembangan perekonomian nasional, apalagi dengan aset yang demikian besar, kita bisa melihat seberapa besar pajak dan dividen yang

dimasukkan, apakah itu sebanding dengan aset yang dimiliki. Itulah fungsi daripada pengawasan kita sebagai Anggota Komisi VI.

BUMN juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat, terutama di tengah ancaman serta tantangan global yang semakin besar, seperti ancaman resesi ekonomi yang sekarang ini Cina mulai kelihatan ya, kemudian di Hongkong, juga di Eropa dan Amerika. Krisis pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan global *warming* serta situasi geopolitik yang tidak menentu. BUMN diharapkan dapat menjadi penopang bagi ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi ancaman tersebut. Kita tahu persis bagaimana mana pada situasi Covid, dalam situasi normal pun di era globalisasi kita juga melihat bahwa *state capital, be leading* dan *leader* pada saat berkompetisi di, di, di era global ini. Oleh karena itu, BUMN harus mampu mengembangkan daya saing serta kinerja perusahaan dalam mendukung ketahanan dan perkembangan ekonomi nasional.

Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, transformasi usaha BUMN secara berkelanjutan menuju BUMN yang lebih berdaya saing, harus tetap dilaksanakan. Ini yang kita kerjakan selama 4 tahun terakhir ya, bagaimana navigasi, terutama pembangunan prioritas pemerintah ini banyak penugasan-penugasan kepada BUMN-BUMN yang kita miliki. Tapi, sejauh mana *benefit* rasio yang harus kita ukur, sejauh mana dampak dari aspek pertumbuhan ekonomi dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, inilah sebenarnya yang dimaksud kenapa BUMN harus terus berdaya saing itu perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan terkait dengan pertimbangan ekonomi nasional.

Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh di seluruh tubuh BUMN. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting untuk dilaksanakan dalam mewujudkan BUMN yang berkinerja baik, berkinerja baik.

Terakhir, inisiatif strategis serta aksi korporasi BUMN diharapkan lebih diarahkan pada program-program yang memberikan dampak besar bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Terkait dengan peran vital BUMN tersebut, dalam rapat kerja kali ini Komisi VI DPR RI ingin mengetahui secara langsung dari Menteri BUMN Republik Indonesia terkait dengan perkembangan kinerja BUMN, serta program transformasi dan restrukturisasi BUMN yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN sekaligus kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada Saudara Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, untuk dapat menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Pimpinan Komisi VI yang terhormat, dan
Seluruh perwakilan Dewan yang hadir yang hari ini, dan**

Tentu saya tidak segan-segan mengucapkan terima kasih atas dukungan daripada Komisi VI selama ini untuk kita bisa lihat transformasi yang terjadi di BUMN ini berjalan dengan baik. Tanpa pengawalan dan pengecekan daripada Anggota Dewan, saya yakin ini tidak mungkin kami bisa sampai hari ini. Dan tentu di tahun terakhir daripada kepemimpinan dan tim yang ada di Kementerian BUMN, kami mengucapkan terima kasih atas semua jerih payah sehingga kita bisa *mensukseskan* banyak hal di seluruh program transformasi BUMN.

Tentu, Pimpinan, saya ingin menyampaikan awal melalui laba konsolidasi BUMN yang di mana insya Allah ini akan selesai audit kurang lebih di bulan Mei ini. Sebagai catatan memang laba di 2022 itu lebih tinggi dari 2023 dikarenakan ada yang *non-cash* waktu itu 55,7 triliun, hasil dari restrukturisasi Garuda sendiri dan tentu *cash*-nya itu 254. Kalau kita lihat untuk 2023 nanti, hasil audit kita secara *cash*-nya ini 292, 292 triliun, artinya ada kenaikan kurang lebih ya cukup signifikan, hampir 40, 38 triliun lebih, kalau kita *apple to apple* secara *cash*-nya, jadi memang program restrukturisasinya *kan* tidak masuk ke angka tahun ini, jadi sudah selesai *gitu*.

Dan karena itu juga kami memberanikan diri, kemarin kita juga sudah bicarakan secara tidak langsung ke Pimpinan Komisi VI, *alhamdulillah* kemarin saya cek dari Kementerian Keuangan, sudah menerima total penuh daripada dividen yaitu di tahun 2023, 81,2 triliun. Dan kita kemarin coba cek-cek lagi untuk 2024 ini, yang di mana dividennya itu akan terjadi di tahun 2025, kurang lebih proyeksi ini masih di 85,5 triliun, jadi ada peningkatan, sejalan dengan kenaikan, keuntungan secara *cash* yang kemarin yang di *slide* sebelumnya saya sajikan.

Dan kemarin juga kita cek juga kontribusi total kepada kontribusi pendapatan negara secara total, kurang lebih dari dividen pajak PNBPN BUMN ini kurang lebih sudah mencapai 20%, jadi dari total pendapatan negara, 100% kontribusi kita itu kurang lebih 20%, ini yang kita dorong.

Dan tentu sebagai catatan juga, ini di *slide* berikutnya yang terpenting, seperti juga kita terus dorong yang dinamakan penyehatan dan juga tentu penugasan yang kita sudah inikan. Di tahun 2024 ini memang kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai 13,6 Triliun dan saya kira mohon atas PMN yang diusulkan ini, dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan seluruh jajarannya. Dan kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025, supaya tentu keberlanjutan daripada program yang sedang kita dorong ini sudah bisa didata sejak tahun ini, untuk tahun depannya sendiri.

Adapun untuk yang 2024, ini ada,

- KAI, pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru senilai 2 triliun,
- lalu PT Hutama Karya, penyelesaian tugas tol Palembang–Betung 1,6,
- lalu Reasuransi Indonesia Utama, penguatan permodalan itu 1,
- lalu Pelni pembelian tiga kapal penumpang untuk rute perintis yaitu 3 triliun,
- lalu INKA peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih 2 triliun,
- lalu penyehatan daripada ID Food untuk penguatan modal itu 1 triliun, dan tentu
- penguatan perbantuan penjaminan KUR yang ada di IFJ yaitu 3 triliun, ini penugasan dari pemerintah kalau yang IFJ untuk program KUR ini.

Dan itu totalnya 13,6.

Dan tentu untuk APBN 2025 secara PMN-nya, kita mengusulkan 44 triliun, di mana yang terbesar itu dari;

- Hutama Karya, Pembangunan JTTS fase 2 dan 3 yaitu 13,8 triliun,
- lalu ini yang masih negosiasi dengan Kementerian Keuangan mengenai perbaikan permodalan ASABRI yang kalau kemarin itu mereka *top up* secara struktur tapi ini ada PMN, ini kita masih nego, kita memintanya memang seperti yang kemarin ya, Pak, ya sepertinya di *top up* bukan PMN *gitu*.
- Lalu PLN, ini mengajukan listrik masuk desa 3 triliun,
- lalu penguatan permodalan KUR, juga ada lagi ini penugasan itu sebesar 3 triliun,
- lalu Pelni itu pengadaan kapal baru 2,5 triliun,
- Biofarma, ini fasilitas Capex baru sebesar 2,2 triliun,
- Adi Karya, pembangunan tol Jogja–Bawen dan Solo–Jogja itu 2,1 triliun,
- Wijaya Karya perbaikan struktur permodalan,
- lalu LEN, penyehatan keuangan 2 triliun,
- Dana Reksa, pengembangan usaha 2 triliun,
- Kereta Api, pengadaan *trainset* baru penugasan pemerintah ini 1,8,
- lalu modal kerja dan investasi program CPP ini 1,6, untuk ID Food,
- PTPP penyelesaian proyek Jogja–Bawenan dan KIT–Subang itu 1,5 triliun,
- Perum Damri, pengadaan bis listrik 1 triliun,
- Perumnas, restrukturisasi dan penyelesaian persediaan 1 triliun, dan
- juga INKA, pembuatan kereta KRL.

Tentu seperti *slide* sebelumnya, kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN masih lebih besar dividennya, kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45% di sini, kita bisa lihat. Jadi Ini yang kita ingin usulkan kepada Komisi VI. Apakah kita boleh lanjutkan atau membahas ini dulu, kalau tidak, saya minta

beberapa direksi untuk memaparkan paparan, mohon saran dari Komisi VI, Pimpinan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Izin, Pimpinan, mungkin paparannya kalau saya lihat kalau waktunya sangat *mepet* sekali, mungkin paparannya lain waktu *aja*, kita terima dulu ini pendalamannya, betul.

Terima kasih.

MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Ya, kalau *gitu* kita lanjutkan, mengenai tiga, yaitu Progres *Updating* Restrukturisasi Waskita Karya, Perubahan Peruntukan PMN Utama Karya Tahun 2024 Periode 1, Progres *Update* Restrukturisasi dan Rencana *Right Issue* Wijaya Karya, mungkin untuk Waskita, saya persilakan jajaran direksi yang hadir.

DIREKTUR UTAMA PT WASKITA KARYA (MUHAMMAD HANUGROHO):

Terima kasih, Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang terhormat Bapak Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPR RI,**

Langsung saya sampaikan terkait dengan Progres *Update* Restrukturisasi Waskita Karya, memang hampir saat ini posisi untuk yang per Desember 2023, memang total hutang induk terutama khususnya itu sekitar 41,2 triliun, memang ada beberapa komposisi hutang kita, yaitu perbankan hampir mencapai 26,3 triliun, termasuk ada KMK penjaminan sebesar 5,2 triliun, termasuk obligasi non penjaminan sekitar 4,7 triliun.

Secara fundamental, memang kita melakukan proses renegotiasi kepada perbankan maupun pemegang obligasi yang seluruhnya sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu dan sudah hampir 1 tahun kita masih dalam posisi *standstill* untuk yang perbankan dan sudah mengerucut pada pembahasan kesepakatan.

Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk target dari progres restrukturisasi perbankan terutama untuk *master restructuring agreement* untuk Waskita, kita targetkan *signing* ini dapat kita lakukan pada April 2024. Selain itu juga kita renegotiasi kepada pemegang obligasi non-penjaminan yang ada di *market* sebesar 4,7 triliun. Dari empat seri kita sudah sepakat tiga seri sudah disetujui dengan tenor 10 tahun dan penurunan suku bunga *haircut* menjadi 5%.

Selanjutnya untuk yang saat ini sedang *on progress*, kita melakukan negosiasi yaitu terkait dengan penjaminan KMKP, Kredit Modal Kerja Pemerintah, ini penjaminan dan obligasi penjaminan. Ini masih dalam tahap

finalisasi untuk memperoleh kesepakatan akhir sebelum ditandatanganinya MRA tahun 2024 ini.

Selanjutnya, *next slide*, ini terkait dengan progres dukungan terutama untuk Bogor–Ciawi–Sukabumi, yang sebelumnya dukungan pemerintah atas ruas tol Waskita, telah disetujui PMN melalui Hutama Karya sebesar 12,5 triliun, sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024 lalu, yaitu untuk *supporting* penyelesaian Kayu Agung–Palembang–Betung sekitar 10 triliun dan Bogor–Ciawi– Sukabumi 2,5 triliun. Namun, di seiring waktu untuk tol Bogor–Ciawi– Sukabumi kami melakukan divestasi dan sudah dilakukan penandatanganan jual beli saham kami untuk di Bocimi dengan SMI yang ditandatangani tanggal 25 Januari lalu.

Selanjutnya untuk sisa ruas, berdasarkan hasil kesepakatan dan diskusi dengan SMI, kami secara *B2B* akan menyelesaikan atau dibiayai oleh PT SMI. Selanjutnya, yang sebelumnya alokasi 2,5 triliun Bocimi untuk ruas ini akan dialihkan untuk ruas tol Kayu Agung–Palembang–Betung, adapun hal ini tidak *merubah* total alokasi PMN yang disetujui oleh pemerintah.

Selanjutnya untuk Kayu Agung–Palembang–Betung, Waskita Sriwijaya Tol (WST) telah mengajukan pengurangan ruang lingkup PPJT semula dari satu ruas menjadi dua ruas. Dan selain itu juga kita proses untuk Jamdatun, *review* oleh Jamdatun atas pemisahan PPJT tersebut. Selainnya, selain itu juga terkait dengan proses pengesahan revisi Perpres, penugasan JTTS kepada utama karya oleh presiden atas ruas Palembang–Betung. Selain itu juga kajian legal dan kajian komersial telah diselesaikan dan BPKP, BPKP telah melakukan *review* atas biaya penyelesaian pada tahap 2 tersebut.

Selanjutnya juga ingin kami sampaikan bahwa untuk selanjutnya, terkait dengan *project* tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu, kami memperoleh dukungan konstruksi dari Kementerian PUPR hampir mencapai 3,5 Triliun dan saat ini telah dilaksanakan proses lelang dan rencananya *target signing* akan dilakukan pada Maret 2024 ini.

Mungkin demikian yang kami sampaikan dari sisi Waskita. Demikian, Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Terima kasih.

Mungkin dilanjutkan oleh Dirut Hutama Karya, silakan.

DIREKTUR UTAMA PT HUTAMA KARYA (BUDI HARTO):

Terima kasih, Pak Menteri.

**Bapak Pimpinan Komisi VI DPR yang kami hormati,
Bapak-Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati,**

Kami laporkan realokasi perubahan peruntukan PMN tahun, PT Utama Karya Tahun Anggaran 2024 periode 1. Utama Karya sesuai dengan rencana semula mendapat PMN sebesar 18.604.000.000.000 yang terdiri dari:

1. Penggunaan untuk jalan tol Trans Sumatera tahap 1 sebesar 600 eh 6.104.000.000.000, akan ada realokasi menjadi 5.177.000.000.000; kemudian
2. Untuk melanjutkan jalan tol Kayu Agung–Palembang–Betung seksi Palembang–Betung yang semula 10 triliun, realokasi menjadi 13.427.000.000.000; kemudian untuk yang,
3. Untuk melanjutkan jalan tol Bogor–Ciawi–Sukabumi yang semula 2,5 triliun, sesuai dengan penjelasan Direktur Utama Waskita tadi, ini tidak jadi, sehingga realokasi untuk Utama karya tetap sesuai dengan semula sebesar 18.604.000.000.000.

Latar belakang dan pertimbangan realokasi tersebut antara lain adalah berdasarkan hasil *review* BPKP pada Oktober 2023. Terdapat penyesuaian kebutuhan PMN tahun 2024, untuk jalan tol Trans Sumatera tahap 1 menjadi 5.177.000.000.000. Penyelesaian tol Ciawi, Bogor–Ciawi–Sukabumi yang awalnya direncanakan melibatkan PT Utama Karya, mengalami perubahan, melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur melalui skema *business to business* dengan Waskita Karya.

Yang ketiga, ruas tol Kayu Agung–Palembang–Betung, kapal Betung seksi Palembang–Betung sesuai hasil *review* BPKP memerlukan biaya sebesar 15.027.000.000.000. Dari pertimbangan latar belakang tersebut maka total alokasi PMN Utama Karya sejumlah 18.604.000.000.000 tetap digunakan untuk penyelesaian proyek strategis nasional jalan tol.

PMN yang semula untuk tol Ciawi–Sukabumi sebesar 2,5 triliun dan sebagian PMN untuk jalan tol Trans Sumatera tahap 1 sebesar 927 miliar, dialihkan ke ruas tol kapal Betung seksi Palembang–Betung, sehingga terdapat penyesuaian alokasi yang semula 10 triliun menjadi 13.427.000.000.000 untuk kapal Betung. Ketiga, penggunaan PMN dan penyelesaian proyek dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Demikian, Pak Menteri, yang bisa kami laporkan.

Terima kasih.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Terima kasih, Pak Budi Harto.

Kita lanjutkan untuk progres restrukturisasi Wijaya Karya, Pak Dirut, silakan.

DIREKTUR UTAMA PT WIJAYA KARYA (AGUNG BUDI WASKITO, S.T., M.Tech.):

Terima kasih, Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, serta Bapak-Ibu Anggota Komisi VI,

Langsung saja kami sampaikan, yang pertama terkait dengan progres restrukturisasi Wijaya Karya, kami sampaikan bahwa ada dua restrukturisasi yang kami lakukan. Yang pertama adalah restrukturisasi terhadap total kewajiban sebesar 20,7 triliun dari perbankan, yang kedua adalah restrukturisasi kewajiban obligasi.

Adapun progres dari restrukturisasi tersebut yang pertama adalah dari restrukturisasi terhadap perbankan, dari total 15 perbankan, sudah tanda tangan MRA dan secara efektif sudah berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.

Untuk yang berstatus perpanjangan pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo pada bulan Maret perpanjangan obligasi telah disetujui pada tanggal 16 Februari 2024, namun untuk sukuk masih belum disetujui sehingga WIKA berencana untuk melakukan pelunasan sukuk yang akan jatuh tempo tersebut.

Kemudian terkait *update* progres PMN, Bapak-Ibu sekalian, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 terkait APBN 2024 bahwa WIKA akan dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk PMN sebesar 6 triliun pada Kuartal 1 tahun 2024. Tentu dalam pelaksanaan amanat PP Nomor 33 Tahun 2005, Kementerian BUMN mengonsultasikan rencana pelaksanaan privatisasi yang akan dilakukan melalui metode *right issue* sesuai dengan surat Menko Perekonomian kepada Komisi VI DPR RI.

Kemudian sampai dengan saat ini, tahapan registrasi di OJK sudah berjalan, kemudian paralel kami sedang menunggu penandatanganan PPPMN, mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan di minggu ini, paling lambat minggu depan, sebagai salah satu daripada syarat efektif.

Bapak-Ibu sekalian,

Kami sampaikan juga bahwa, dari target hasil daripada *right issue*, dari total PMN sebesar 6 triliun, di mana porsi pemerintah 65%, publik 35%, sehingga secara total, target total *right issue* adalah 9,2 triliun, yang mana tentu dana tersebut kami pakai untuk mendukung perseroan dalam penyelesaian proyek-proyek PSN maupun proyek IKN yang hampir semuanya harus selesai di tahun ini maupun tahun 2025.

Kemudian yang kedua, tentu untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dan juga untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kondisi keuangan kami.

Kemudian hal-hal penting yang bisa kami sampaikan dalam proses *right issue* dalam rangka PMN WIKA tahun 2024. Yang pertama adalah partisipasi publik atas pelaksanaan *right issue* yang mungkin masih rendah karena memang *performance* kami yang sedang tidak baik, sehingga kami telah melakukan di antaranya langkah melakukan NDR atau *roadshow-roadshow* kepada beberapa pihak agar bisa yang punya publik bisa diserap.

Kemudian yang kedua adalah waktu pelaksanaan *right issue* maupun PMN yang memang sangat ketat pada kuartal 1 tahun 2024, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan para *stakeholder* termasuk juga dengan OJK, karena memang kami perusahaan Tbk.

Kemudian yang ketiga adalah *pricing strategy* maupun kondisi *suspend* WIKA di dalam bursa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, *right issue* nanti akan kami lakukan dalam kondisi saham sedang *ter-suspend*, karena sejak akhir Desember, *suspend* tersebut. Kemudian dengan adanya kondisi sedang *tersuspend*, sehingga kami mempersiapkan dengan metode penilaian saham menggunakan KJPP yang sudah kita lakukan.

Kemudian yang kelima, penerbitan saham baru WIKA akan dilakukan di bawah nilai buku. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kami sudah memperoleh opini baik itu dari BPKP maupun Jamdatun, bahwa penerbitan saham di bawah nilai buku diperbolehkan, dengan tata kelola yang baik.

Kemudian *slide* terakhir, Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan indikasi jadwal maupun tanggal pada proses *right issue* dalam rangka PMN WIKA tahun 2024. Dimulai dari arahan komite privatisasi yang sudah kita lakukan di, di 30 Januari. Kemudian pada hari ini kami konsultasi dengan Komisi IV dalam rangka *right issue* kemudian penerbitan PP PMN, kami harapkan dalam minggu ini bisa keluar. Kemudian setelah itu kami baru bisa efektif dengan OJK dan tentu penerimaan dana PMN bisa terlaksana di bulan April, karena memang kebetulan awal April banyak libur sehingga mungkin di akhir April.

Demikian kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, kami kembalikan kepada Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Terima kasih, para Direksi.

Mungkin saya tambahkan saja, Pimpinan, bahwa total daripada PMN yang diusulkan tadi yaitu 44,249 itu sebagai catatan 69% adalah penugasan yaitu, 30,4 triliun, di mana di situ terdiri dari tentu penugasan HK, Asabri, PLN, BPUI, Pelni, KAI, RNI, Perumnas, dan lain-lain. Lalu 27% yaitu 11,8 triliun untuk pengembangan usaha, di situ ada Biofarma, ada Dana Reksa, PTPP, dan lain-lain, dan ada 4% yaitu untuk restrukturisasi seperti yang disampaikan yaitu, WIKA, ini sebagai catatan tambahan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih kepada Saudara Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan respons, tanggapan, maupun masukan, terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri BUMN pada hari ini.

Berdasarkan daftar penanya yang telah masuk pada kami, sebelah kanan, Pak Mufti Anam, Pak Deddy Sitorus, Pak Rudi Hartono Bangun, Pak Harris Turino, Mbak Rieke Diah Pitaloka, Pak Sonny, Pak Muslim. Sebelah kiri, Pak Herman Khaeron, Pak Darmadi, Mbak Evita, Ibu Nevi, Pak Khilmi, Bu Melani, Pak Husni, Pak Gde Sumarjaya Linggih, Pak Subardi. Ada 16 dari kawan-kawan Anggota, mohon tertib, disiplin waktu, untuk 2 menit saja. Untuk pertama, kami beri kesempatan Pak Herman Khaeron.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Mendadak *bener*.

Terima kasih, Pak Aria Bima, ketua rapat hari ini yang saya kira *cool* sekali. Terima kasih.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,
Para Direksi BUMN Karya-karya yang hari ini akan meminta persetujuan
dan melaporkan berbagai hasil kinerjanya,**

Pertama, tentu saya harus memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras Pak Erick Thohir dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN yang terus meningkatkan *performance* dan kinerja di BUMN. Termasuk bagaimana hari ini menampilkan laba konsolidasi di BUMN dan juga deviden yang diserahkan kepada pemerintah. Tentu wajar kalau kita memberikan apresiasi.

Yang kedua, ini juga terkait dengan manajerial yang tentu dibangun di era kementerian yang dipimpin Pak Erick. Namun, saya ingin mendapatkan lebih dalam sebetulnya, apakah efektif dengan menggunakan *subholding* seperti yang sekarang diterapkan, ini *kan* kesempatan akhir tahun, memberikan evaluasi terhadap kinerja, ataukah menggunakan *clustering* yang sebetulnya sejak awal bukan *subholding* tujuannya, justru dengan

membangun *cluster-cluster* dalam rumpun BUMN sejenis yang menurut saya memang kegunaannya juga banyak hal yang ini bisa mengurangi terhadap tingkat persaingan dan resistensi dalam berbagai pekerjaan.

Namun dengan *subholding*, saya melihat banyak aspek yang justru kurang efisien. Nah, oleh karenanya barangkali nanti, Pak Erick, saya minta penjelasan, walaupun tidak cukup waktu hari ini, karena ini sifatnya lebih detail, termasuk bagaimana dalam perspektif keuangan secara konsolidatif, saya kira saya mohon nanti bisa tertulis *gitu*.

Yang kedua, kalau saya menilai terhadap kinerja sampai tahun 2024 ini, memang BUMN diwarnai dengan persoalan *fraud*, persoalan penyalahgunaan kewenangan. Jiwasraya, 2019 baru masuk, kita sudah ribut dengan Jiwasraya, kemudian Asabri, Dapen-dapen BUMN yang menurut saya juga ini harus didalami betul. Terakhir, Taspen, yang tentu ini sangat mengkhawatirkan terhadap industri keuangan kita. Dan saya memberikan apresiasi atas peran aktif Kementerian BUMN untuk melaporkan ke kejaksaan dan tentu membuka berbagai kasus yang selama ini tersembunyi dibalik berbagai cara finansial yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan keuangan ini.

Nah, oleh karenanya, menurut saya ini penting dibuka kepada publik, supaya apa? supaya ke depan, kasus-kasus seperti ini tidak terjadi. Bahkan di tengah situasi Waskita Karya yang sedang terpuruk, juga kasusnya terjadi juga *gitu*. Jadi bagaimana mungkin bisa mengangkat kinerja lebih baik lagi ke depan, apabila persoalan-persoalan dengan kejahatan internalnya ini terus terjadi *gitu*. Kepercayaan itu penting. Apalagi dengan situasi keuangan yang sedang sulit, kepercayaan menurun, apalagi yang bisa dijadikan modal untuk meningkatkan kinerja? *kan* tidak ada lagi. Nah, ini *kan* tinggal akhirnya Kementerian yang harus mengambil alih dan terus meng-*adjust* dengan berbagai cara yang bisa meningkatkan kinerja, baik keuangan maupun secara umum adalah kinerja perusahaan.

Kemudian, oleh karena itu saya mohon nanti ketiga was, eh ketiga karya-karya ini juga kalau bisa ya di, dibayar dululah ya, jangan sampai nanti direksinya justru ada saja persoalan-persoalan. Sudah mulai bagus, Waskita sudah mulai bagus, saya kira, restrukturisasinya sudah mulai terlihat, namun Wijaya Karya juga mohon ini diperhatikan betul, Utama Karya, *leading* saya kira. Dan atas berbagai usulan yang disampaikan, kami dukung, dan termasuk perubahan anggaran, perubahan alokasi PMN untuk Utama Karya, saya kira ini patut kita dukung karena sudah dalam pertengahan perjalanan, tidak ada lagi pembahasan yang tentu harus berpanjang lebar, tetapi akuntabilitas harus tetap kita kedepankan.

Kemudian satu hal yang ingin saya angkat yaitu terkait dengan alokasi PMN. Pak Menteri, saya berpikir 2023 ini sudah selesai, 2024 ini sudah selesai untuk IFG Bahana PUI. Jadi dengan tahun 2024 usulan yang 3 triliun, saya kira sudah selesai di sini, ternyata masih muncul di tahun 2025. Oh ini untuk yang KUR? oh berarti ada, pakai cabang *dong* Pak, berarti kalau KKUR kan berarti ada di, Jamkrindo Askrindo ya *toh*? maksud saya pakai cabang

dong ya toh, di sini kan enggak kelihatan, *gitu*. Jadi kalau disebutkan keterangannya *kan* kelihatan, berarti ini untuk tetap menjaga penjaminan di KUR, kalau itu dimaklumi. Oleh karenanya, kalau masih menampilkan IFG Bahana PUI masih ada 3 triliun, saya tadi pertanyakan, *kok* ada lagi, ada lagi ini, katanya sudah selesai, sitaan sudah masuk, apalagi ini persoalannya, *kan gitu*. Pak Robert ini *gimana* ini, Pak Robert.

Kemudian perhatian khusus saya adalah terhadap BUMN pangan, ini yang lagi-lagi, Pak Erick, kita dapat melihat dampak yang begitu luas di persoalan pangan. Oleh karenanya, apakah tidak ada cara yang lebih *out of the box gitu* ya, bahwa pemberian PMN terhadap BUMN-BUMN pangan ini punya proyeksi yang lebih besar, porsinya lebih besar *gitu*, sehingga ya selain membantu meningkatkan kinerja perusahaan di sektor pangan, juga tentu ini akan membantu terhadap ketersediaan pangan secara nasional.

Oleh karenanya menurut saya, kalau mau betul-betul memperlihatkan kinerja positif, baik langsung maupun tidak langsung, baik kepada korporasi maupun terhadap rakyat, ya BUMN pangan inilah yang menurut saya harus punya proyeksi yang lebih baik.

Oleh karenanya, saya kira APBN untuk alokasi PMN tahun 2025 nanti kita akan bahas, termasuk PLN kalau lisdas, lisdasnya di mana? sampai sekarang karena di desa-desa saya, di Cirebon itu masih banyak sekali rumah-rumah yang tidak teraliri listrik. Jadi kalau elektrifikasi 99%, justru saya mempertanyakan, di mana lisdas-lisdas ini dipasang? Kalau kemudian sekarang akan memulai kembali dengan permohonan penyertaan modal negara. Saya kira demikian.

Terima kasih, Pak Bimo.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Pak Mufti Anam, kami persilakan.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri dan seluruh jajaran,

Pertama, *Marhaban Ya Ramadhan, rabbana taqabbal minna siyamana innaka antas sami'ul alim.*

Yang kedua, kami mengapresiasi Pak Menteri atas kinerja keuangannya, di tengah situasi politik setahun terakhir yang tidak baik-baik saja tapi BUMN bisa terus bertumbuh.

Yang ketiga, kami senang melihat Pak Menteri dan jajaran tambah *seger*, Pak, kalau Bapak lihat Anggota kita ini makin kering-kerontang, karena 6 bulan terakhir di dapil ternyata rakyat makin cerdas, maka kami berharap betul ke depan, BUMN bisa kolaboratif dengan kami, dengan mitra kerjanya, bukan hanya dengan oknum-oknum tertentu, karena kami semua di sini ini ya *alhamdulillah* bisa melewati lubang jarum itu. Tapi banyak kawan kami yang mereka setiap hari rajin ke tempat ini tapi juga tidak jadi, karena tadi, karena rakyat sekarang semakin cerdas, kalau kita tidak kolaboratif maka kita akan apa namanya, tergilas oleh situasi itu, Pak.

Namun demikian, dengan pencapaian Pak Menteri tadi yang luar biasa, ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan dalam rangka kecintaan kami terhadap BUMN, Pak. Yang pertama, walaupun berbeda kubu tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan, katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah, kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan *privilege* untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, mematok harga yang tinggi, bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya, Pak.

Nah, kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat, amburadulnya pengelolaan BUMN terlihat dari usulan dan realisasi PMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai 226,1 triliun, yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap deviden yang diberikan oleh BUMN kepada negara, pada kenyataannya akan kembali BUMN melalui PMN yang diberikan kepada BUMN, begitu. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini, ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari PMN, tapi tetap saja hancur-hancuran, begitu juga dengan Garuda Indonesia.

Kemudian kalau kita lihat di bulan, bulan Maret, baru-baru ini, Pak Prabowo juga mengkritik keras BUMN, saya jadi heran, kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BUMN? padahal di bulan ini pemilu sudah selesai, padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas, padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja, begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan, ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik, bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya jadi, apa, lintah darat bagi bangsa kita dan kemudian beliau membubarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai menteri, Menteri BUMN di periode 2019-2024, akan

dicatat sebagai, dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu begitu, Pak. Maka harapan kami, ke depan harus diperbaiki, Pak. Di waktu yang singkat ini, ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BUMN, mohon maaf, kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini *omon-omon aja* begitu, *no action*. Jadi hanya kalau katanya anak muda, seperti itu tadi.

Nah, kemudian yang selanjutnya, soal target BUMN dalam renstra tahun 2022 – 2024 sudah pasti tidak tercapai. Artinya sekali lagi Pak Erick Thohir gagal total dalam memimpin BUMN periode 2020, periode 2019-2024. Saya ini sudah sering mengingatkan Menteri BUMN, mengenai capaian renstra. Sebenarnya cara sangat mudah untuk melihat kinerja BUMN adalah melihat capaian labanya.

Kalau kita lihat di renstra tahun 2020 hingga tahun 2024, yang di situ dipaparkan bahwa target kumulatif laba BUMN adalah 1.172 triliun, mungkin Bapak lupa di halaman berapa, itu di halaman 65 renstra. Nah, adapun target kumulatif, kalau mau kita jabarkan tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut adalah 178 triliun, kemudian 199 triliun, 222 triliun dan 248 triliun, yang kita total adalah 847 triliun. Sedangkan capaian laba seperti yang dipaparkan oleh Pak Erick Thohir tadi, ketika kita pantau dari tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut hanya 13 triliun, kemudian 125 triliun, 390, eh 309 triliun, dan kemudian seperti yang dipaparkan soal asumsi 2023 yaitu, 292 triliun, yang artinya totalnya hanya 790, 739 triliun, yang kalau kita kemudian kita cek *gap*-nya adalah ada 108 triliun yang tidak tercapai.

Kemudian ditambah target laba tahun 2024, yang di dalam renstra disebutkan yaitu 325 triliun, maka ditambah *gap* yang ada, totalnya saya hitung-hitung tadi adalah 433 triliun. Nah, maka kami tidak habis di akal pikir kami, hal ini akan tercapai di periode akhir Bapak. Karena apa? kalau kita lihat, laba BUMN kontributor terbesar adalah dari bank BUMN yang itu mencapai 44%, yang itu saya pikir di periode di tahun 2024 ini, paling mentok dari akumulasi perbankan BUMN hanya tercapai 160 triliun.

Maka sekali lagi, hal yang Bapak lakukan selama ini, ya seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi, hanya sekedar *omon-omon* saja. Belum lagi kalau kita lihat di renstra, target capaian lain yang tidak tercapai yaitu soal ada 6 BUMN yang Bapak sampaikan di renstra, akan masuk dalam top perusahaan global pada tahun 2023 dan ada 7 perusahaan BUMN yang akan masuk dalam top perusahaan global di tahun 2024, yang itu di tahun 2023 ini baru tercapai, satu yang masuk *Fortune 500 global* yaitu Pertamina. Maka harapan kami ke depan, hal ini perlu untuk kemudian dilakukan langkah-langkah taktis agar kemudian bisa mencapai target-target yang sudah Bapak paparkan di renstra 2020-2024.

Kemudian yang ketiga, soal Formula E. Formula E tahun 2024 tidak dilaksanakan karena alasannya, karena kondisi politik yang tidak stabil. Tapi kalau kita lihat, MotoGP tetap dilakukan walaupun tren penontonnya terus menurun. Artinya tidak dilakukan formula E ini hanya soal kontestasi pilpres saja begitu. Maka harapan kami, Pak Menteri, Bapak tahu bahwa

penyelenggara Formula E pengganti Jakarta adalah mana, Pak Menteri? yaitu, Tokyo dan Shanghai. Maka harapan kami di tahun berikutnya, ini kan sudah kelihatan di *quick count* kalau menurut apa namanya capres yang Pak Menteri dukung *kan* begitu, artinya pemilu *kan* sudah aman-aman saja. Artinya, harapan kami Formula E ini bisa terus diteruskan agar bagaimana ini yang sudah sejalan dengan konsep hilirisasi dan pengembangan industri listrik di negara kita bisa segera terwujud, begitu.

Kemudian yang keempat, soal penundaan IPO Pertamina hulu energi. Kembali Kementerian BUMN kami lihat bahwa baru-baru ini akan menunda Palm.Co. Tidak habis di pikiran kami bahwa 2 tahun yang lalu, ketika negara kita mengalami kelangkaan minyak goreng, yang di sisi lain minyak sawit begitu melimpah di negara kita, yang kemudian ada inisiasi dari Kementerian apa namanya, BUMN untuk membuat Palm.Co agar menjadi industri minyak goreng terbesar di negara kita. Tapi kenyataannya, baru-baru ini diumumkan itu akan ditunda, apakah kita kalah dengan oligarki-oligarki yang ada di dalam negeri kita, Pak? yang kemudian ini, tidak kemudian tidak dilakukan, padahal rakyat sangat berharap banyak sekali atas hal ini.

Kemudian yang kelima, Pak. Pada kesempatan kali ini, saya, Mufti Anam dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan dan meminta laporan keuangan BUMN atas pertanggungjawaban penggunaan dana investasi untuk pengembangan *startup* di Indonesia, yang melibatkan anak perusahaan Telkom, anak perusahaan BRI, dan lainnya, yang dikucurkan ke berbagai *startup* yang mencapai triliunan rupiah. Kalau perlu, Pimpinan, dalam hal ini dibentuk panja, agar kemudian kita bisa tahu secara terang benderang persoalan yang terjadi ini.

Kemudian soal PMN, di halaman 7. Kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan Pak Menteri tadi, ada peningkatan permintaan PMN naik 200%, maka harapan kami ini bisa dikaji ulang, karena agar negara tidak begitu murah meriah memberikan PMN begitu saja tanpa mengukur produktivitas dari PMN itu sendiri.

Maka yang pertama saya setuju dengan apa disampaikan oleh kawan kami, Pak Herman Khaeron, setahu kami 2 tahun lalu ketika kami rapat dengan PLN, saat itu sudah jelas bahwa dengan PMN terakhir itu, waktu itu bisa dicek di rapat 2 tahun lalu, Pak Dirut PLN mengatakan bahwa "Ini adalah tahun terakhir kita meminta PMN untuk kepentingan program listrik masuk desa". Pertanyaannya, ke mana duit PMN 2 tahun yang lalu? Kemudian hari ini, ketika minta program listrik desa ini, kami ingin tanyakan, kami sepakat apa yang disampaikan kawan kami, Partai Demokrat tadi, dana PMN yang dibutuhkan 3 triliun ini akan disalurkan di listrik desa di mana saja? Dan yang kedua, harapan kami ketika itu memang benar-benar dibutuhkan, maka harapan kami juga tidak menggunakan transmisi seperti yang selama ini berjalan karena itu biayanya sangat mahal, mungkin ke depan bisa menggunakan EBT, agar lebih efektif dan juga kemudian bisa mendukung program pemerintah soal energi baru terbarukan.

Kemudian soal ID Food. Seminggu yang lalu, di minggu yang lalu kami juga rapat dengan ID Food, dengan RNI. Kami sangat kecewa ternyata setelah kami memberikan PMN ke RNI, tidak ada perbaikan ke RNI. Dan ternyata di tengah mahalnnya harga minyak goreng, di tengah harganya, meningkatnya harga beras, PM, eh ID Food bahkan jauh lebih mahal harganya daripada di pasar dan sebagainya. Artinya apa? Artinya PMN yang diberikan pemerintah tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Maka harapan kami, kalau ini tidak jelas peruntukannya, tidak jelas KPI-nya, untuk dicoret dari daftar usulan PMN di tahun 2024, begitu.

Kemudian di halaman nomor 2, Pak Menteri. Di halaman nomor 2 soal PMN tadi, kami ingin tanya agar tolak ukurnya jelas, PMN yang sudah diberikan kepada apa, BUMN-BUMN ini tidak secara akumulatif, devidennya saya ingin tahu secara jelas berapa deviden BUMN penerima PMN? Ini agar kemudian kita tahu mana saja BUMN yang sebenarnya hidup hanya bergantung dari PMN, agar kemudian tidak jadi benalu, tidak merusak BUMN yang-yang bagus-bagus yang selama ini telah berjalan.

Mungkin itu saja sedikit dari kami, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Panjang banget. Ibu Nevi.

F-PG (NUSRON WAHID):

Latihan jadi oposisi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Iya, terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Dan Anggota Komisi VI kami hormati,
Pak Menteri bersama jajaran,**

Yang pertama, yaitu tentang ini Pak Menteri, tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa, APBN, 20% APBN dari BUMN, Pak, ya, sekarang yang saya mau tanyakan, Pak, berapa jumlah aset yang dimiliki dan dikelola-dikelola oleh BUMN? apakah deviden yang diberikan kepada negara sudah proporsional? Jadi dari aset BUMN-nya, Pak, *gitu*.

Lalu yang kedua, yaitu tentang pengajuan Pak Menteri IFG untuk, di sini ditulisnya tadi, untuk permodalan KUR ya, ya Bahama PUI untuk KUR. Tolong dipastikan, Pak, bahwa memang ini untuk KUR, maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman Khaeron bahwa untuk Jamkrindo dan

Askrindo, dan, dan kita tidak mau nanti ternyata anggarannya digunakan untuk Jiwasraya atau mungkin untuk yang lainnya, itu yang kedua, Pak.

Lalu yang ketiga, pembengkakan hutang perusahaan BUMN Karya di antaranya disebabkan oleh penugasan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang masif selama beberapa tahun ini. Penyebab terjadinya pembengkakan hutang BUMN Karya di antaranya dikarenakan karena ada kasus korupsi yang menimpa pimpinan/manajemen perusahaan sehingga mempengaruhi persepsi pelaku pasar pada kinerja BUMN Karya. Apa solusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terhadap BUMN yang mengalami kesulitan melakukan penyelesaian persoalan hutang pada BUMN Karya yang dikarenakan menjalankan penugasan dari pemerintah, yang sering kami dengar dari BUMN Karya? Dan apa pertimbangan yang diberikan pemerintah dalam memutuskan suatu penugasan kepada suatu BUMN? Dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terhadap direksi BUMN, sehingga kejadian seperti pada manajemen perusahaan Waskita yang melakukan korupsi bisa diantisipasi? Baru-baru ini kita dengan Taspen, Pak Menteri, itu yang ketiga.

Yang keempat, untuk ke depan singkat kata, bagaimana sih sebetulnya kondisi BUMN sekarang ini, Pak, idealnya, dengan jumlah yang ada apakah masih dipertahankan, masiakah ada penggabungan atau pelepasan dan untuk kemudian meningkatkan kinerja BUMN, untuk bisa bergerak dan bersaing dengan perusahaan swasta lain saja. Apa saja aturan perundangan yang perlu diperbaiki atau dibuat yang baru, agar BUMN nanti bisa berkembang dengan lebih baik lebih cepat dalam bermanuver, bahkan bisa menjadi perusahaan kelas dunia?

Terus selanjutnya, tentang Hutama, apa namanya, PMN Hutama Karya yang ada perubahan, apakah sudah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan, Pak, ya? Itu yang selanjutnya.

Yang terakhir, terkait Garuda. Bagaimana proses restrukturisasi Garuda Indonesia, kabarnya sudah rampung. Tahap selanjutnya kapan dan bagaimana skema penggabungan ke holding InJourney.

Terima kasih, Pimpinan, itu saja.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Sebelah kanan, Pak Deddy Sitorus.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Rekan-rekan Anggota yang terhormat,
Pak Menteri dan jajaran,**

Ya pertama-tama tentu kita harus apresiasi bahwa, setelah melewati pandemi, ternyata apa yang sudah ditarget itu bisa apa namanya, kita capai ya dividen tahun lalu, walaupun secara akumulatif sebagaimana yang disampaikan Mufti tadi, ya tentu secara makro, belum seperti yang diharapkan. Tapi memang *kan* kita tahu situasi global tidak mudah. Tetapi itu juga bukan pembenaran pada dua hal, pertama, sisi kebijakan negara terkait penugasan-penugasan yang sebenarnya menurut saya di luar kemampuan, itu yang menyebabkan hari ini Karya-Karya ini harus masuk ICU untuk dapat PMN-PMN-an, *kan gitu nih*. Lalu yang kedua, tentu apa namanya, masalah di dalam BUMN itu sendiri.

Nah, saya ingin katakan bahwa tugas Pak Erick tidak mudah dan waktu semakin sempit, Pak. Tapi ada hal yang menjadi *concern* saya, kadang orang teriak itu juga untuk mendapat perhatian ya. Ini yang saya khawatirkan nanti kalau dalam proses transisi pemerintahan ini juga, BUMN ini seperti kota tanpa benteng, Pak, kalau hari-hari ini tidak dibuat satu rencana yang baik, baik itu dalam konteks apa namanya, *structure* dari BUMN itu, SDM-nya, *planning-planning* ke depan, proses *recruitment*-nya, maka kita akan *back to square one*, Pak, apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun, 4 tahun lebih ini, tentu juga akan menguap. Kalau misalnya pejabat berganti, nah, ini *kan* kembali kayak *wes wes wes nih*, kobo-kobo *kan* bermunculan ini ya. Jadi kalau tidak punya sistem *recruitment* dan pemetaan, insan-insan BUMN yang bagus maupun *talent-talent scout* dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti *ngulang-ngulang* lagi kita, *starting from zero* lagi ini urusannya.

Nah, oleh karena itu saya kira itu harus menjadi perhatian ya, karena saya tahu hari-hari ini orang-orang BUMN sedang sibuk cari ranting pohon *nih* untuk bergantung. Dan ini akan sangat berpengaruh pada, ya banyak beringin. Beringin memang tempatnya orang bergantung dan berlindung, Pak, sampai kayaknya salah itu *statement*, kalau ada yang berpesta bukan PDIP, Pak.

Jadi ini saya kira sangat krusial, Pak, ya, sangat krusial, karena apa? Sebaik apa pun perencanaan dan sistem, kalau *mentallity* dan *corporate culture*nya masih sama, omong kosong, Pak. Dalam konteks itulah saya lihat Waskita. Saya dulu orang Waskita, Pak, pernah komisaris di Waskita Beton dan saya bawa IPO lalu saya keluar. Setelah saya tinggal hancur itu barang, karena apa? saya tahu mentalitasnya jelek semua. Jadi begitu IPO, saya keluar, ya, dan itu kemudian terbukti. Maka pertanyaan saya pada Waskita, apa yang sudah berubah? Kalau hanya hitungan-hitungan manajemen, keuangan, dan segala macam, orang dan karakternya masih sama, Pak, saya kira *nggak* akan ada perubahan. Jadi kita hanya gali lubang tutup lubang, apa yang sudah diubah, Pak? Dulu saya bertengkar dengan Pak Kholiq karena dia *put everything in one basket* dan sekarang dampaknya mereka rasakan, saya sampai ribut waktu itu. Sekarang *ngapain* Waskita? Apakah seluruh energinya hanya tersita untuk mengurus dosa-dosa masa lalu itu atau enggak, ya *kan*?

Ini kan sama dengan katakanlah HK dan WIKA. Dulu dikasih beban yang *gitu* berat, kita terlalu optimis, tapi karena mimpi presiden, kita dukung. Dan sekarang kalau orang marah pada Waskita, marah pada HK, marah pada WIKA, ya marah pada mimpi kita yang dulu, yang sama-sama kita dukung. Konsekuensinya sekarang memang negara harus turun, karena apa? Semua proyek-proyek itu enggak *feasible* secara bisnis, *kan gitu nih*. Yang kita kesalkan adalah dulu banyak orang pesta-pora karena bisa dapat hutang sebanyak-banyaknya. Sekarang harus minta tolong negara. Yang salah siapa? Ya kita semua *dong*, jangan cuma nyalahkan BUMN Karyanya. Ya *kan lu* sendiri *doang*, tapi *kan* ini kita bicara partai politik dan fraksi ya, bukan pribadi-pribadi. Jadi ini *kan problem*. Jadi kita harus melihat dalam konteks itu. Tidak sekedar WIKA-nya bagaimana, ininya bagaimana, *this is political decision by all of us*, ini *problemnya* yang harus kita pegang.

Nah, kemudian yang kedua soal HK, Pak. Saya pernah tanya Pak Dirut *nih*, bagaimana dengan ruas Pematang Siantar-Parapat. Nah, ini enggak masuk nih di usulan ini. Saya sebagai orang yang lahir di Pematang Siantar juga punya mimpi supaya jangan tempat Andre *aja* yang dibangun *tuh* tol-tolan. Karena apa? Danau Toba itu kawasan *super* prioritas, kalau itu enggak disambung, Pak, Pak Jokowi selesai, ya, Pak Luhut enggak ada, ya saya enggak yakin itu barang akan lolos lagi ke depan, nanggung ya kalau menurut saya, Pak.

Jadi kali ini saya malah mengusulkan, Pak Menteri, HK kalau bisa usulkanlah itu yang Parapat, karena apa? Investasi kita sudah terlalu besar untuk kemudian itu di ujungnya malah gagal, kalau menurut saya ya, walaupun saya tahu dua tol ruas tol yang diusulkan oleh HK sekarang ini, itu apa namanya, memang mau enggak mau harus *diterusin* supaya tol Sumatera itu tersambung.

Lalu yang ketiga, ini terkait ekosistem, Pak Menteri. Ketika kita menyatukan InJourney, apakah kita hitung bagaimana ekosistem itu kemudian bisa *nyatu* dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian juga yang lain. Saya kira InJourney bisa belajar dari yang lain, yang kalau kita anggap sudah berhasil ya. Karena apa? InJourney ini menurut saya ke depan akan menjadi salah satu ujung tombak buat BUMN, Pak, tetapi proses sinkronisasi semua yang ada di dalam itu tentu perlu dipikirkan dengan matang supaya tersambung *gitu* ya, jangan sampai nanti InJourney hanya jadi EO, Pak, sayang kita, padahal *kan* di dalamnya ada ekosistem yang sebenarnya bisa di, di ini.

Saya setuju dengan kawan-kawan yang lain, terutama Mufti Anam tadi soal ID Food. Menurut saya, bisnis strateginya enggak jelas, Pak. Apa *sih* peran ID Food sebenarnya yang kita harapkan? Ini saya kira harus dirumuskan ulang, Pak, ya. Pada satu sisi dia, apa namanya, mirip-mirip Bulog, pada sisi lain dia mirip-mirip sama, apa namanya, usaha kecil rakyat yang kelontong, ini *kan* sebenarnya mau di mana *sih* ID Food ini? Kayaknya perlu dirumuskan ulang, Pak, apa sebenarnya yang kita harapkan dari ID Food? Apakah stabilisator harga atautkah dia bertugas untuk daerah-daerah yang terpencil atau bagaimana? Karena ada Bulog, ada Badan Pangan

Nasional, lalu apa masih perlu kita misalnya ID Food misalnya, apakah benar-benar dia bisa menjadi *integrator* dari bisnis terkait dengan pangan *gitu*? Kalau memang iya, serius kita bikin *masterplan*-nya yang benar. Kalau enggak, buat apa *gitu* kalau menurut saya ya.

Lalu kemudian ini presiden, capres, cawapres, tiap hari bicara hilirisasi. Saya enggak tahu sampai sekarang di mana peran BUMN di dalam situ, ya. Misalnya Antam, di mana *sih* duduknya pada persoalan, misalnya konsorsium CATL dan LG itu? Enggak pernah kita bicarakan itu barang, padahal presiden, capres, cawapres, setiap hari mendiskusikan masalah ini, seolah-olah hilirisasi ini mantra ajaib yang akan membawa kita menjadi Indonesia emas. Ini di mana BUMN? Yang saya tahu, saya pernah diskusi dengan banyak orang, Antam *tuh* punya peluang untuk bisa menjadi pemegang saham yang dapat dukungan yang kuat. Jangan dikira CATL dan LG itu enggak cari pendanaan, Pak, mereka keliling juga, Singapura, Hongkong, dan segala macam, cari duit, *which is* menurut saya Antam juga bisa lakukan. Saya sudah bicara dengan banyak *banker* juga, tapi kita belum pernah diskusi soal ini.

Lalu kemudian yang terakhir, saya kira dari saya, soal listrik desa. Saya justru heran kenapa jadi 3 triliun, Pak, sementara di kampung saya, eh di kampung saya, di dapil saya masih banyak sekali, butuh, ya. Di satu sisi saya sepakat, jangan berpikir mencari tegangan, tapi des, karakter desa di dapil saya itu, Pak, satu desa di tengah-tengah hutan, di lembah gunung yang tidak ada jalan raya, tidak ada apa-apa. Jadi kawan-kawan juga harus bisa membedakan antara rasio elektrifikasi dengan rasio desa berlistrik. Rasio elektrifikasi itu di kampung itu ada satu solar panel, dihitung rasio elektrifikasi. Tapi rasio desa berlistrik lain, rasio desa berlistrik saja hanya kadang mencakup tempat yang populasinya paling besar, belum dusun-dusunnya, Pak. Kalau saya berharap justru lisdas ini ditambah, Pak, tetap, kok malah kurang. Di tempat saya perlu, apalagi dia sudah menjadi beranda depan NKRI, daerah penyangganya ibukota, justru saya minta ini dipacu, Pak. Karena sangat tidak adil, begitu banyak sumber daya alam dari Kalimantan Utara itu, Pak, puluhan tahun hanya dinikmati orang tapi rakyatnya tetap hidup dalam kegelapan.

Selama ini saya terus-terang sudah sangat bersyukur, PLN *full support*, saya takut ini kalau dengan 3 triliun nanti ditinggal lagi *nih*, Pak, orang-orang yang menjaga perbatasan kita ini tanpa mengeluh. Bahkan mereka kemarin jatuh pesawat, Pak, di sana hanya untuk mengantar yang namanya gula, kopi, dan kebutuhan pokok rakyat. Nah, kalau sampai di, di tinggal ini kawasan, Pak, wah, saya lebih bagus mogok jadi Anggota DPR, Pak, pasang tenda di depan kantor PLN, Pak. Karena dosa saya sama orang Kaltara, kalau sampai Kaltara tidak dapat anggaran yang cukup untuk PLN listrik desa di sana, Pak.

Dan yang terakhir, saya titip, Pak Menteri, untuk Pertamina, Pak. Tadi saya sudah sampaikan, kalau apa namanya, tidak ada jalan raya, ya tentu harus pakai yang namanya *air tractor*, Pak. Bayangkan, orang bicara Papua sudah BBM satu harga, di dapil saya, Pak, daerah perbatasan, 1 liter BBM

solar itu bisa 85.000, Pak, semen satu sak, 2 juta, Pak. Jadi kalau negara tidak hadir di sana, Pak, saya kecewa, Pak. Jadi mohon ditugaskan juga PLN dan Pertamina supaya ada sinergi. Ya kalau tidak, ya, saya kasihan rakyat, Pak, karena di daerah pedalaman itu kalau enggak ada BBM, mereka enggak bisa pakai perahu pergi ke ladangnya, Pak. Itu mereka makan dari mana, cari makannya *gimana gitu*. Jadi tolong nanti, saya juga akan berdiskusi dengan Pertamina, dengan Patra Niaga khususnya, Pak, supaya daerah-daerah terpinggir yang menjaga integritas wilayah kita ini diperhatikan dengan benar.

Terima kasih, Pak Menteri.
Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebelah kiri, kami persilakan, Mbak Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Saya rasa sudah cukup banyak yang diangkat oleh teman-teman, saya hanya ingin memperdalam saja, ada beberapa isu yang tadi sudah diangkat tapi saya hanya ingin mengangkat dari *angle* yang berbeda *nih*, Pak Menteri. Yang pertama, mengenai ketahanan dan kedaulatan pangan. Tadi Herman Khaeron, Mufti Anam, tadi juga Bang Deddy Sitorus sudah mengangkat. Saya ingin melihat bagaimana BUMN ini ke depan memiliki peranan yang penting di dalam ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Kenapa? Karena pelakunya itu banyak di BUMN, Pak. Ada tadi ID Food, Bulog, PTPN, Pupuk Indonesia ya, Pak, ya, semua, PTPN gas, semuanya ada *nih*, Pak, Himbara, bank-bank yang memberi kredit kepada petani dan peternak, jadi pelakunya ada di sini.

Jadi sebenarnya keinginan saya ini bagaimana BUMN ini bisa menjadi solusi seperti kita menghadapi Covid-19 kemarin. Saya bangga apa yang dilakukan BUMN pada saat Covid-19, Pak. BUMN bisa memiliki peranan yang penting pada saat itu, bagaimana juga BUMN bisa memiliki peranan yang penting terhadap permasalahan pangan yang kita hadapi saat ini, Pak. Nah, ini yang saya inginkan, Pak Menteri juga bisa memikirkan ke arah sana.

Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri, jadi apa yang saya teriakkan di setiap rapat *nih*, Pak Menteri, jangan sampai masalah dari dana pensiunan ini menjadi bom waktu. Saya selalu teriak. Dan Pak Menteri sudah memproses itu, Pak, dengan melaporkan yang namanya BUMN pengelola-pengelola, apa namanya, bukan pengelola ya, oknum-oknum, yang *mengkorupsi* dana-dana daripada pensiun ini ke Kejaksaan Agung. Sekarang sudah berapa itu, Pak, kemarin, dua yang terakhir, total sudah sembilan ya, Pak, ya sudah sembilan, luar biasa menurut saya. Namun demikian pertanyaan saya, *what's next*, Pak

Menteri? ya *kan*. Karena biar bagaimana juga, keinginannya itu adalah tidak cukup hanya sampai melaporkan kepada hukum, ini kepada nasabahnya ini seperti apa, Pak Menteri? Jangan sampai mereka ini dirugikan nanti ke depan, jangan segala sesuatu itu dengan sudah sampai kepada masalah hukum, ke masalah hukum kemudian dianggap sudah selesai. Masih banyak hal-hal yang lebih penting lagi, yaitu proteksi terhadap nasabah, Pak Menteri. Bagaimana hak-hak mereka ini bisa dipenuhi ke depan, Pak, jangan sampai sudah dilaporkan dalam progres, apa namanya, penyelidikan dan yang begitu panjang saya tahu nanti, saya harap waktu mengenai Jiwasraya bisa selesai, Pak, *kan* waktu itu, Pak. Nah, bagaimana ke depan ini juga dana pensiun ini juga bisa diselesaikan berbarengan Pak, jadi tidak apa namanya, tidak, tidak ada yang dirugikan nasabah-nasabah kita ke depan.

Yang menjadi pertanyaan saya juga satu, Pak, apa itu dana pensiun, apa itu investasi dari Karya-karya, yang saya dengarkan selalu itu adalah masalah salah investasi, *kan* begitu, Pak, alasannya. Seberapa jauh *sih* keterlibatan daripada Kementerian BUMN di dalam memberikan persetujuan terhadap investasi yang dilakukan oleh BUMN-BUMN ini, Pak? Karena *kan* sebenarnya pemilik daripada BUMN ini *kan* Kementerian BUMN, Pak sebenarnya. Pemiliknya itu secara ini, Kementerian BUMN. Apakah hanya Dirut ini saja yang memutuskan, uang sebanyak itu mau diinvestasi ke A, ke investasi ke B, walaupun itu *high risk*, itu *low risk*, siapa *nih*, peranan Kementerian BUMN ini di mana terhadap keputusan investasi yang dilakukan?

Kalau memang itu belum ada aturannya, Pak Menteri, saya, karena biar bagaimanapun ya tadi yang disampaikan Pak Mufti Anam, akhirnya yang salah itu ya Kementerian BUMN. Terakhir, yang dilakukan sebagai apa Pak Menteri melakukan, terakhir yang akan disalahkan itu kepada Pak Menteri juga, karena orang mengatakan, memang pembinaan dan pengawasan adanya di Kementerian BUMN. Kalau aturan itu belum ada, saya sarankan, Pak Menteri, itu segera dibuat peraturan-peraturan tersebut.

Kemudian yang ketiga, saya sudah, kita sudah lihat ke *site*, Pak Menteri ya, mengenai Kawasan Benoa. Kalau KEK Sanur, saya lihat progresnya ada, tapi Kawasan Benoa *kan* belum ada ya Pak Menteri ya, progresnya ini bagaimana. Kemudian saya melihat apa, *statement* dari Pak Luhut kemarin ini *nih*, Pak Menteri. Singapura mengambil semua *concert nih*, Pak, yang ada *nih* ya *kan*, semua, padahal yang nonton itu orang Indonesia semua, umumnya 80% isinya orang Indonesia. Bagaimana, Pak, kenapa enggak di Kawasan Benoa itu dibangun saja *concert hall*, Pak, untuk itu, cari investor, sehingga enggak usah orang Indonesia ini semuanya pergi ke Singapura untuk nonton *concert* dan Bali pada saat *low season*, kita bisa isi dengan mendatangkan *concert-concert* dari luar negeri.

Saya rasa itu saja, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan, Pak Rudi Hartono Bangun.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Ya, terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Saya hormati Pak Menteri, Pak Erick,
Pak staf khusus,
Pak Dirut-Dirut,
Deputi, dan
Seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati,**

Pak Erick, pertama, saya tentu harus penghargaan, apresiasi, karena memang untuk menjadi seorang menteri memerlukan pemikiran Pak, berkorban pikiran, tenaga, waktu, jadi harus awalnya saya ini memberikan apresiasi dulu, jadi itu sudah seharusnya.

Lalu di rapat ini juga, Pak Erick, saya ingin menyampaikan tentang saran, masukan-masukan kepada Kementerian BUMN. Tentunya Pak Erick dan Deputi dan jajaran sebagai pembina, perseroan atau perusahaan BUMN. Evaluasi yang ingin saya sampaikan begini, Pak, di sini *gitu*. Melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN hari ini, Pak, saya juga ingin menyampaikan ke Pak Erick, deputi, sesmen, jika melihat tren kinerjanya direksi, saya mengusulkan agar dirut, Pak, dan direksi di semua BUMN ini dibuat suatu aturan yang baku, Pak, melalui baik itu permen menteri atau peraturan perpres, Pak, yaitu tentang isinya yang utama, Pak, tidak boleh menjabat lama-lama. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dan harus segera dirotasi seperti contohnya, Pak, yang sudah ada, *tour of duty*, penugasan di misalnya kepolisian atau TNI, Pak. Jadi jika di *tour of duty* para dirut, direksi ini tidak bisa berkreasi lama-lama, bisa dilihat itu, Pak, bisa dibuat surveinya, Pak Aria bisa buat surveinya nanti.

Kemudian juga, Pak, ini *kan* kenapa harus diterapkan di perusahaan perseroan, karena untuk mencegah agar tidak terjadinya kasus-kasus yang disampaikan oleh kawan-kawan. Kasus korupsi, karena apa? Dirut, direksi, ini yang lama duduk, mereka pasti merasa seperti penguasa raja kecil, Pak, itu naluri kita, Pak, wajar saja *gitu*, sehingga dia di rencana tahunan ke depannya akan membuat atau mempunyai niat, berencana ya *kan*, membuat belanja modal *kah*, *Capex kah*, ya *kan*, yang tujuan untuk memperkaya juga, Pak, diri dan orang lain, rekan-rekan *gitu* atau membuat anak-anak perusahaan, cucu-cucu perusahaan dan memasukkan kroninya ke dalam anak-anak perusahaan, yang dijadikan dirut di anak perusahaan itu teman dan orang dekatnya juga begitu. Itu yang saya lihat dan perhatikan, Pak, selama ini di BUMN kita, *gitu*.

Dan, dan sekarang, Pak, sudah banyak juga *kan* ditangani, ada yang Bapak laporkan dan ditangani oleh para penagak hukum, seperti yang di kejaksaan dan di tiga huruf itu, Pak, *gitu*. Jadi yang saya sampaikan itulah gambarannya *gitu*.

Kenapa bisa saya sampaikan? Saya, saya ingin menyampaikan juga, ingin melihat, Pak, contoh, ada saya lihat di Waskita juga *kan*, tadi ada disampaikan Waskita. Di Waskita ini ceritanya mempunyai hutang sekarang 41 triliun dan di paparan ini bisa diselesaikan 17 sampai 20 tahun, Pak, sementara Pak Erick *aja* mungkin masa tugasnya tinggal beberapa bulan. Yang saya ingin ingatkan, Pak, kenapa hanya disampaikan sedihnya di sini? Ini kita cerita tulang, Pak, tulangnya datang kemari mau dibahas, disuruh *ngubur* itu hutangnya. Yang ingin saya sampaikan, kenapa pelakunya, pelaksananya, dirut-dirut yang dahulu, tidak juga kita panggil, Pak, yang 41 triliun itu untuk belanja apa, modal apa, proyek apa, kenapa kita yang ribut di sini, *gitu*. Nah, itu harusnya Pak Erick pembinanya, pembina itu hebat, Pak, misalnya pembina dewan pembina partai apa, *gitu*, kuasa itu, Pak. Laporkan *aja*, “*Tuh* dirut tahun 2021, tahun 1900 sekian, ini dia meng-*capex*-kan sekian, belanja modal sekian”, harus dipanggil, Pak, kalau enggak, wah kita rugi *nih*, dibahas-bahas yang sudah orangnya *happy*, uangnya sudah di Singapura, ya *kan*, rumahnya sudah besar *gitu kan*. Nah, jadi kita ini yang membahas yang 40 triliun di Waskita itu contohnya kurang elok, kalau saya nilai, Pak. Itu harus, jangan kita *aja* yang dikorbankan menurut saya Pak.

Dan juga contoh di PTPP, ada saya lihat itu PTPP itu, juga dirutnya sudah lama juga *kan*. Kalau setiap paparan, *project*-nya banyak, puluhan triliun, memaparkan untungnya, devidennya sekian. Tapi di sini, yang Bapak sampaikan tetap minta belanja modal, Pak, ada PTPP minta belanja modal. Lah saya ingin tanya kembali, kalau ada dirut-nya, ke mana dibuat paparan yang untungnya itu selama mungkin 3 tahun kerja, *project-project*-nya yang puluhan triliun itu *gitu*, kenapa lagi minta suntikan belanja modal 1 T? Ini ada yang, artinya pembukuan yang kemarin dia sampaikan, bisa *aja* manipulasi, Pak, bukan untung *gitu*, nah, itu satu contoh, Pak.

Juga contoh lain yang dirutnya sudah lama misalnya apa, Pelindo, *gitu*, Pak, kalau pupuk kemarin sudah diganti, nah, Telkom juga sudah lama dan bank-bank Himbara *gitu*, mereka sudah lama. Memang ada yang berkreasi ya *kan*, dengan program KUR-KUR-nya menjadi baik dan bagus, devidennya yang Pak Erick bilang tadi jadi besar, bisa sampai 50 triliun, satu bank Himbara. Tapi yang berkreasi aneh juga ada, dan itu masing-masing kita bisa paham *gitu*, Pak.

Jadi itu, Pak Erick, yang ingin saya sampaikan sedikit ya *kan*, sebagai saran, sebagai pertimbangan sama pembina Pak Erick sebagai menteri ya *kan*, biar bisa menorehkan sejarah *gitu*, Pak. Itu, Pak Erick, saya kembalikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Pak Darmadi Durianto.

F-PDIP (Prof Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih, Pak Menteri.

Pak Erick Thohir dan jajarannya,

Sudah lama enggak ketemu, Pak.

Saya pertama, tentu apresiasi juga atas pencapaian laba dan dividen, juga apresiasi atas *support* dari Kementerian BUMN sehingga banyak teman-teman terpilih kembali, karena ada hubungan yang baik, tentu ini membantu Bapak-Ibu semua.

Nah, dari laba, memang ada sedikit kritikan saya, bahwa laba yang dicapai ini memang sangat tergantung kepada beberapa BUMN. Ketergantungan ini menjadi problem, Pak Menteri, jadi ke depan ini enggak boleh terjadi lagi ya. Tidak terasa Pak Menteri *kan* sudah duduk di sana 5 tahun, tentu doa kami, Pak Menteri bisa lanjut duduk di sana terus *gitu*, ya. Nah, ke depan ini saya berharap bahwa ketergantungan kepada laba beberapa BUMN ini harus lebih terdiversifikasi, karena ini enggak sehat sebetulnya. Kalau yang ini rontok maka rontok juga laba BUMN-nya, terutama ketergantungan pada laba dari bank Himbara ya maupun Pertamina dan beberapa, Telkom, perusahaan besar. *Nah*, ini catatan saya.

Yang kedua adalah saya menerima aspirasi dari banyak pelaku industri tentang mematok kuota, PGN ya. Kalau enggak salah 61%, dulu di Bali saya sempat mempertanyakan ada batas minimum dan maksimal. Kalau enggak mencapai minimum dapat denda, kalau di atas maksimal, dendanya 250%, mendapat surat edaran dari PGN. Nah, orang yang mau ngambil order *kan* takut-takut, kalau mencapai maksimal, melebihi maksimal, dendanya 250% Pak Menteri, ya ini *kan* bisa menciptakan de-industrialisasi. Nah, banyak pelaku industri ini, pelaku industri ini menjerit sebetulnya, ya. Hal ini sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu waktu di Denpasar, di Bali ya, tapi ternyata sekarang mereka tetap menjerit, Pak, pasokannya itu di pasok hanya 61%. Di Sumut katanya 11% *doang*, Pak, Pak Menteri. Jadi ini catatan penting soal industri di dalam negeri. Mau *gimana* kita bicara industrialisasi, yang terjadi malah de-industrialisasi. Nah, ini mohon perhatian Pak Erick.

Yang ketiga adalah dulu waktu Pak Erick menjabat, saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris ya. Tapi di akhir-akhir ini saya lihat agak berubah, Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan. Ada yang dalam rangka politik, mundur, istrinya dipakai ya *kan*, jadi ada direksi yang bawa-bawa politik, dimasukkan, padahal tidak kompeten, ada yang lulusan teknik

arsitektur masuknya ke *ngurusin* gas ya. Nah, ini *kan* Pak Erick *kan* harus meninggalkan nama baik ini dalam mengelola BUMN, nah, kita harapkan konsistensi ini jadi penting Pak, Pak Erick ya. Anaknya masih muda, enggak ngerti apa-apa, hanya *ngurusin* bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba *ngurusin* ikut komisaris, *ngawasin* perusahaan besar. Ini catatan yang menurut saya, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan sampai akhir ini, saya tahu banyak tekanan-tekanan politik tapi konsisten saja, Pak, ya. Kalau emas, sampai kapan pun jadi tetap emas, Pak, *gitu* ya. Iya, jangan ikutin nasihatnya Pak Khilmi juga begitu, bercanda, Pak Khilmi.

Yang keempat adalah soal keterbukaan informasi publik, Pak Erick. Pak Erick *kan manggil* yang ber-rapor merah itu, ada 6, BPUI saya lihat di media, Inalum, Bulog, Reasuransi, Asabri, Dana Reksa ya. Tapi saya lihat di PMN yang diajukan Pak Erick, dari 7 perusahaan, ada dua yang rapornya merah. Kalau rapornya sudah merah, keterbukaan informasinya jelek, enggak usah dikasih lagi, Pak Erick, *ngapain, wong* enggak, enggak, enggak mau terbuka *kok, kok* dikasih PMN lagi, Pak Erick? Tahun 2025 muncul lagi tiga, dikasih lagi. Katanya *udah* rapor merah, ya di *stop aja*, orang enggak mau terbuka, Pak Erick sendiri yang *ngomong, wong* enggak mau terbuka *gimana*, sekarang *kok* enggak mau buka diri, kalau enggak mau buka diri, ya *stop aja*, enggak usah kasih, nanti habis ini, Pak, PMN-nya ini, Pak, enggak tahu uangnya lari ke mana ini. Nah, ini tegas saja, Pak Erick, ya sudah coba-coba mau menyembunyikan sesuatu, rapor merah, *kan* Pak Erick sudah mau panggil katanya. Nah, saya harapkan tegas saja sama mereka, kalau enggak ya *stop aja*, DPR juga akan menyarankan ini supaya di *stop* ini, ya, karena rapornya sudah merah begitu, kalau partainya merah bagus, Pak.

Nah, yang ketujuh, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Deddy Sitorus ini, saya juga khawatir, Pak. BUMN ini dari masa ke masa, dari masa ke masa selalu jadi bancakan. Di zaman Pak Erick ini, Pak Menteri Erick ini bagus ya. Nah, saya berharap ke depan ini, kekhawatiran itu bisa muncul lagi. Jadi kalau bisa memang disusun apa itu, mungkin SOP yang bagus, mekanisme yang bagus, supaya memang ini di, di jaga, Pak, untuk ke depan *kan*. Kalau Pak Erick yang meneruskan *kan* bagus, tapi kalau nanti menteri lain *kan* belum tentu juga ini, paling dipakai jadi alat untuk pengumpulan kekayaan, Pak Erick. Nah ini kekhawatiran saya juga bisa terjadi *gitu*. Jadi kita mohon nanti, tolong yang ada lubang-lubang tuh ditutup-tutup dulu, Pak, ya, supaya nanti lubang itu enggak bisa dipergunakan kembali *gitu*. Jadi itu poin-poin penting.

Yang terakhir adalah soal janji-janji, soal hapus tagih dari bank Himbara, hapus tagih. Itu bagaimana kesiapannya itu, Pak? Karena kita juga *ngomong* di bawah, ada hapus tagih bagi para pelaku usaha kecil terutama, ini sampai di mana progresnya ya. Apakah Pak Menteri juga ikut pantau soal hak hapus tagih ini, ya, sehingga bisa berikan informasi pada forum ini, begitu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya ke sebelah kanan, Pak Harris Turino.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Erick Thohir, Menteri BUMN,
Pak apa ini, Wamen 3 atau Wamen 2, Pak Aria, beserta
Direksi, jajaran Direksi dari BUMN Karya,**

Pertama-tama saya apresiasi, Pak, pencapaian laba konsolidasinya ini case tertinggi 292 triliun dan setoran dividennya lebih dari 80 triliun, jadi setoran dividennya lebih besar daripada PMN, ya. Ini tentu satu prestasi, tetapi juga kali ini saya ingin memberikan beberapa catatan yang berfokus pada dua hal, yang pertama, dari sisi *good corporate governance*-nya dan yang kedua dari sisi keuangannya. Saya mulai dari *good corporate governance* dulu, Pak Erick.

Tadi Pak Darmadi sudah mengatakan bahwa hebatnya seorang Erick Thohir itu di mana *sih*. Hebatnya seorang ET adalah ketika dia mampu memilih orang-orang timnya yang sangat kuat. Kenapa BUMN-BUMN sekarang, BUMN-BUMN utama, mampu mencetak laba yang sedemikian tinggi, adalah juga karena timnya yang sangat kuat. Beberapa jajaran direksi BUMN masih bermasalah, yes, tetapi paling tidak, BUMN utama memberikan kontribusi lebih dari 80% dari keuntungan konsolidasi dari BUMN. Tetapi harus diakui, Pak Erick, 1 tahun terakhir menjelang pemilu, terjadi satu perubahan yang menurut saya sangat dirasakan, penempatan orang-orang lebih banyak nuansa politiknya tanpa mempertimbangkan kompetensi, ini bukan seorang Erick Thohir. Erick Thohir yang saya kenal adalah orang yang mampu memilih orang yang sangat mendukung dan sangat kompeten. Tapi belakangan banyak diisi hanya dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Bahkan seorang Erick Thohir sendiri terlibat di dalam tim sukses paslon. Ini menjadi catatan buat saya pribadi di Komisi VI, ini di sisi *governance*-nya.

Kemudian dari sisi keuangan. Ada arena-arena yang bisa dilakukan perbaikan, contoh nyata adalah 292 triliun dari hampir 10.000 triliun aset, berarti *return on aset*nya hanya sekitar 2,92%, lebih rendah daripada imbal balik obligasi *risk free*, sehingga arena perbaikannya masih bisa banyak dilakukan, apalagi kalau kita melihat distribusi dari sumber dividennya, hanya kepada beberapa BUMN saja di Himbara, Telkom, Pertamina, dan beberapa BUMN yang lain, ini tentu menjadi PR yang besar. Ini juga sekaligus membikin negara sebenarnya kehilangan *opportunity*, dengan kelolaan 10.000 triliun aset yang ada di tangan, seharusnya mampu untuk *generate* lebih besar kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara. Tapi faktanya adalah 292 triliun, walaupun ini masih yang terbesar sepanjang sejarah.

Mengenai kontribusi pajak yang tadi Pak Erick katakan, bahwa bukan hanya dividen, tetapi pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Kalau menurut saya, siapa pun perusahaannya, baik BUMN maupun swasta, kalau dia beroperasi di sini, juga akan memberikan kontribusi pajak, ya.

Arena perbaikan yang lain adalah pengelolaan manajemen hutang, terutama pada BUMN karya. BUMN karya yang tadinya adalah perusahaan-perusahaan yang *slim*, sehat, tetapi mendapatkan penugasan sehingga menjadi perusahaan-perusahaan yang tambun dan syarat hutang, komorbid, akibatnya beberapa di antaranya masuk ICU. Dan sampai sekarang ya antara hidup dan mati. Dengan kondisi seperti ini, tadi Pak Erick mengusulkan adanya *right issue* pada WIKA sebesar 3,2 triliun. Di atas kertas tentu ini rencana yang baik untuk restru, karena kebutuhan dana 9,2 triliun, 6 triliun ini akan ditutup oleh PMN dan 3,2 akan ditutup lewat *right issue*.

Ada dua pertanyaan saya, yang pertama, usulan PMN-nya hanya 2 triliun, tetapi di *chart* yang Bapak tampilkan, 6 triliun, yang benar yang mana? Ataukah yang 2 triliun 2025, 2026, 2 triliun lagi, demikian pula 2027, sehingga terpenuhi 6 triliun, atau seperti apa? Dan apakah 3,2 triliun, Pak Erick yakin mampu diserap oleh satu perusahaan yang harga sahamnya saja masih di *suspend*? Dan kita perlu belajar dari *right issue* yang dilakukan pada Waskita, di mana jelas *right issue* ini merugikan investor. Dan sampai sekarang *issue*-nya Waskita juga sama bahwa, sahamnya masih *suspend*, sehingga ini menjadi satu *concern* saya.

Kemudian mengenai Utama Karya. Tadi ada dana PMN Bocimi yang 2,5 triliun dan sisa dana Trans Sumatera tahap 1, kira-kira 1 triliun yang dialihkan ke Tol Kapal Betung. Kita tahu berdasarkan *review* yang Bapak paparkan dari BPKP, itu kebutuhannya 15 triliun, sedangkan ini hanya 13,4, kekurangannya 1,6 dari mana? Rasanya ini juga perlu menjadi dielaborasi agar tidak terjadi informasi yang simpang-siur.

Kemudian mengenai jalan tol di Jawa, Pak Erick. Bagaimana mengenai jalan tol yang dari Tegal menuju ke Cilacap. Beberapa kali wacana itu muncul tapi selalu tenggelam lagi, apakah memang ada di dalam rencana kerjanya, BUMN mana yang akan mengerjakan dan kapan akan direalisasikan?

Dan yang terakhir mengenai PLN. Sama seperti *concern* rekan-rekan yang lain. Setiap tahun kita menyetujui PMN yang selalu digunakan untuk elektrifikasi menuju ke 100%. Kalau PMN ini digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang paling bawah, itu mudah dimengerti karena harga tarif listrik untuk golongan paling bawah memang tidak pernah naik sejak 2014. Tapi kalau elektrifikasi 100%, itu definisi yang sebenarnya seperti apa? Karena faktanya di daerah pemilihan saya, banyak sekali rumah yang belum memiliki listrik. Sangat tidak adil ketika orang melihat saya naik kereta Whoosh Jakarta – Bandung, kereta listrik, dan warga di dapil saya *ndak* punya listrik. Dan ketika kita ajukan ini kepada PLN, PLN menjanjikan, “Oke warga miskin dapat pemasangan listrik gratis”, kita sudah data, faktanya sampai sekarang baru 50 sambungan, padahal sudah ada ratusan bahkan

mungkin sekitar 1.000 sambungan yang dijanjikan gratis. Mohon perhatian dari Pak Menteri BUMN.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Sebelah kiri, Pak Khilmi.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya,**

Jadi manifesto Partai Gerinda itu *kan*, satu, Pak, tentang ketahanan pangan, energi, dan ketahanan negara, air juga. Jadi selama ini kita sebagai Anggota Fraksi Gerindra harus mengawal, karena apa? Presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto, *udah* pastilah Pak Bimo, tenang, ya besok lah, besok *kan udah* digedok.

Jadi menurut saya, Pak, untuk ketahanan pangan ini kita harus sinergi semua, antara pabrik pupuk, di pangan, sama di energi. Jadi setelah saya pelajari, Pak, BUMN pupuk ini juga ada *ngawurnya gitu loh*. Kenapa dulu di 2014-2019 kita bisa swasembada pangan, tetapi di 2019 ke 2024 kita masak malah *lost*, kesalahannya ada di pabrik pupuk, yang dulu formula NPK itu 15: 15: 15 diganti tanpa mengadakan depot dulu ke sawah-sawah petani *gitu loh*. Jadi unsur nitrogennya tercukupi, P-nya dikurangi, K-nya dikurangi. Jadi ini unsur nutrisinya tanaman *kan* jadi tidak seimbang. Dan ini *kan* dibiarkan *aja* sama kementerian, harus *kan* ditanya kenapa *kok* mengganti 10: 12: 15. Lah inilah Bapak kalau nunjuk direksi bukan ahlinya yang di situ, jadi *kan* harus orang ahlinya yang ditunjuk di situ itu, masa dari sembilan direksi, yang dari pupuk cuma satu? Apalagi sekarang *sub-subholding* dari pabrik pupuk juga isinya bukan dari orang pupuk.

Jadi saya ini setelah baca bukunya Pak Rauf Purnama ini, Pak, dia bisa membikin industri dari Kujang itu tambah empat, di Petro, ada tujuh yang ditambah. Karena apa, hasil samping dari industri itu dibikin. Jadi memegang industri BUMN itu tujuannya, *kan* punya tujuan, kalau berhubungan dengan hidup rakyat banyak sesuai dengan Pasal 33, itu dikuasai oleh negara. Dan kompetensi orang yang *mimpin* di situ harus ada, jangan asal tunjuk, tunjuk, tunjuk habis *gitu jeblok*.

Coba Bapak bayangkan, laba dari BUMN itu adalah banyaknya yang dari PSO negara, pupuk diberi penugasan tapi tanpa penelitian, formula diganti. Terus masalah *sub holding-sub holding* itu Pak, ini Pak Menteri ya, saya tanya, ini. Ketua, izin sebentar ya.

Pak Menteri, tujuan membentuk *sub holding* itu untuk apa? Jawab, Pak Menteri. Tujuannya itu untuk efisiensi atau apa *gitu loh*. Saya sudah izin, minta pertanyaan ini dijawab oleh Pak Menteri. Sebentar, *kan* habis ini saya ngomong terus sebentar lagi, iya Pak Menteri apa? Enggak, sebentar *tok*, tujuannya *aja* untuk efisiensi atau apa itu *aja* jawaban, dua kata *aja*.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Untuk efisiensi dan juga penyelarasan daripada produk yang akan diturunkan secara spesifik.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Sudah ya, ini, saya teruskan sekarang.

Jadi tujuan *sub holding* yang dibentuk oleh BUMN itu bukan efisiensi, malah tambah mahal, seperti antara pupuk, PI membentuk *holding* pupuk logistik untuk penyaluran lewat dia. PI Log, tidak punya kapal, kapalnya sewa. Kalau kapalnya itu sendiri, saya salut lah untuk efisiensi. Terus ini masalah *subholding* Pertamina. Ini kan ada *sub holding* hulu, terus transportasi, kilang, terus patra, jadi ini efisensinya di mana? Kita pernah rapat di sini sama Pertamina, antara *subholding* satu sama *subholding* yang lain, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan.

Coba dari hulu, itu diangkut oleh Pertamina transportir itu ya, PIS *tah* itu, terus dari kilang, dia *ngangkut* lagi ke Patra Niaga untuk didistribusikan. Tapi yang bagian pengangkutan ini *kan* mau minta untung gede, masalahnya di sisi lain ada yang labanya besar, di sisi lain ada yang rugi *kan gitu*, itu kan enggak boleh, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jadi sebelum Pak Prabowo dilantik, ini harus dirapihin dulu, supaya nanti subsidi tetap sasaran dan harganya tidak mahal *kan gitu*, Pak. Karena nanti *cuap-cuap*, omong-omong, wah ini BBM kok masih mahal terus ya. Jadi ini harus diselaraskanlah antara hulu, hilir, sampai di penjualan. Masalahnya, misalnya ini kayak, kayak kilang itu, belinya kan dari PHE, PHE jual secara harga internasional, yang di sini, di kilang, pasti *megap-megap*, untungnya sedikit mungkin bisa rugi, jadi *kan* harus diselaraskan semua. Rapat Direksi bagaimana antara *subholding* yang satu dan *subholding* yang lain itu sama-sama untung.

Di pangan juga *gitu*, Pak, ada yang di *subholding kan* ini nanti di sininya juga yang berat. *Kan* tujuan kita membentuk BUMN itu *kan* bukan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi ini kondisi ini kalau terus, diteruskan, ya maka yang satu rugi, yang satu ada untung. Itu dari saya, Pak, mudah-mudahan Pak Erick bisa mencerahkan.

Terus satu lagi, Pak, lupa ini, tentang penambahan Direktur Operasi di Pupuk Kaltim. Di Petro, enggak ada Direktur Pupuk Operasi, di Kujang

enggak ada, di PIM enggak ada, di Pusri enggak ada, kenapa di Kaltim itu ada, padahal pabriknya tidak serumit yang ada di Petro. Ini ini *kan* ada apa *gitu loh*, pesan-pesanan dari mana, orang *nylonong-nylonong*, ada direktur operasi, nambah-nambahi biaya. *Wong* dulu empat direksi *aja* sudah cukup, tiga *tah* itu, tiga itu sudah cukup, ditambah. Ini kayak nunjuk orang raja mabuk *aja*. Jadi saya harap ini perbaikan-perbaikan di BUMN ini harus dilaksanakan dengan baiklah. Jangan karena Bapak senang, ini, terus Bapak tarik ke direksi-direksi. Saya sudah *ngomong* dua kali ini, masalahnya masih tetap kayak begitu terus.

Sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Silakan *on air*, *Teh Rieke*.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

Pertama-tama, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadhan, semoga pertemuan kita ini benar-benar membawa barokah untuk kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya,**

Yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya minggu lalu juga saya sudah sampaikan kepada pimpinan di dalam rapat ini, mengenai kasus yang terjadi pada Taspen, memang dibahas di sini. Justru seharusnya hematnya karena ini sesuatu isu yang cukup besar, sensitivitas kita juga diuji begitu, *kok* kita tidak bahas secara khusus mengenai isu Taspen. Tadi terima kasih, Pak Khaeron sudah juga menyampaikan. Karena persoalan di Taspen ini sudah sempat saya sampaikan pada bulan September, tanggal 14 September 2022. Saya mengingatkan agar PT Taspen berhati-hati dalam melakukan investasi. Lalu kemudian pada Januari 2023, KPK menerima laporan dari pihak luar terkait investasi untuk menghindari kerugian negara dengan tiga surat permintaan keterangan, tanggal 11 Januari 2023, 1 Maret 2023 dan 7 Juli 2023. 21 Juni 2023 BPK menemukan

unreleased loss BUMN PT Taspen di 13 emiten senilai 762,82 miliar. 1 September 2023 mantan istri Dirut Taspen yaitu Dirut Taspennya, saya selalu ingat wajahnya, karena beliau selalu pakai kopiah begitu, jadi kelihatan sangat saleh, namanya Pak Antonius Kosasih ya, saya tidak tahu tujuannya pakai kopiah itu apa.

Nah, kemudian 3 September 2023 *corporate secretary* PT Taspen, Mardiani Pasaribu mengaku tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan. Maret 2024, bulan ini, KPK melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi PT Taspen, menaikkan kasus ke tahap penyidikan, menduga korupsi PT Taspen merugikan negara ratusan miliar dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019. Dan kemudian saya mengapresiasi Pak Erick Thohir, akhirnya Pak Erick Thohir menonaktifkan Saudara Antonius NS Kosasih sebagai Dirut PT Taspen. Saat ini KPK mengaku masih mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Dalam mencermati beberapa pemberitaan terakhir, PT Taspen di Desember 2023 melayani 6,79 juta orang peserta. Sempat dikatakan, akan di tahun lalu kalau saya tidak salah, Kementerian Keuangan mengatakan akan menghentikan pensiun karena membebani APBN. Dan kita sama-sama sepakat waktu itu, Pak Erick, saya masih ingat. Kita sangat tahu bahwa uang di Taspen bukan uang BUMN atau uang Kementerian Keuangan atau dari APBN, tetapi itu adalah uang *cost sharing* antara pekerja dan pemberi kerja, pemberi kerjanya negara, pekerjaannya adalah aparat sipil negara.

PT Taspen, Saudara-saudara, mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun, program pensiun, tetapi produknya waktu itu Bapak yang berkopiah itu menjelaskan dengan detail, programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini, Pak Erick ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, seperti kita mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri. Jangan, Pak, potongan upah orang yang bekerja dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum, sudah pasti salah, ditinjau dari sudut agama mana pun saya kira tidak ada yang membenarkan. Bayangkan, orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib.

Bapak, disampaikan tadi ada sekitar 700, sekitar 762,82 miliar uang yang investasinya enggak jelas, Pak. Investasinya, lalu kemudian orang mengatakan, beberapa pejabat negara mengatakan, "Tenang, dana pensiun aman", jadi pertanyaan kita, lalu yang enggak aman itu uang apa, uang jaminan hari tuanya *kah*, uang jaminan kecelakaan kerja atau uang apa dari peserta? karena itu bukan uangnya BUMN, bukan uangnya Kementerian Keuangan dan bukan uang APBN sesungguhnya. Saya minta bantuan, kita kolaborasi, kita minta dibongkar dan dari penjelasan Bapak yang berkopiah yang saya tidak akan sebutkan lagi namanya, Antonius, namanya iya.

Jadi saya merasa, Pak, ini di akhir jabatan kita bersama periode ini, Pak, di sini ada Bapak yang sering berkomunikasi, kita bekerja keras untuk membantu nasabah-nasabah Jiwaskaya dan sebagainya. Tolong bantu, Pak, ini uang pensiunan. Waktu itu dikatakan bahwa, tadi ada yang menanyakan, siapa yang menentukan investasi di PT Taspen? Bukan Menteri Keuangan, eh bukannya Kementerian BUMN, tapi Kementerian Keuangan yang menentukan. Oleh karena itu dalam kesempatan terbuka ini, karena saya juga dan *live*, KPK kalau memang serius, ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan. Karena ketentuan investasi THT, Tabungan Hari Tua, berupa deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung, dan *property*, koreksi jika saya salah, Pak Menteri, tetapi saya kira di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi mengenai program-program dalam jaminan sosial.

Itu mengenai Taspen, Bapak, mohon bantuannya. Apakah, nanti jawaban tertulis saja Bapak, jangan, Pak, kita jangan, *udahlah* kita semua yang ada di sini, kalau kami mungkin *insya Allah*, ya *insya Allah* kita dilantik lagi karena hasil penghitungan KPU yang, yang terpilih itu akan dilantik lagi. Tapi di jajaran BUMN, belum tentu *loh* ya, siapa pun belum tentu. Ini kesempatan kita, ini bulan Ramadhan, *yuk lah* kita ibadah, Pak, bongkar, Pak. Saya yakin Pak Erick bisa, karena sudah menangani kasus Jiwaskaya, Asabri, yang sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Pak Erick, pada masa jabatan Pak Erick. Untuk Taspen, saya yakin kita bisa kerja sama untuk membantu para aparatur sipil negara.

Yang kedua mengenai pangan, Bapak. Di sini tadi sudah disampaikan, permintaan suntikan dari APBN 44,249 triliun, salah satunya untuk ID Food. Saya hanya akan men-*state* dalam persoalan pangan ID Food. Kemarin kita kritik bersama. Mahal itu, Pak, jualannya, Pak, *ngapain* mesti ada ID Food. Betul kata Deddy Sitorus dan teman saya yang satu lagi. Sudah ada Bulog, perkuat saja Bulog, Pak. ID Food jualannya mahal. Dan kemudian Bulog juga ada masalah serius, tapi saya tidak melihat Bulog di sini mendapatkan bantuan keuangan, padahal juga Bulog membutuhkan dukungan terkait beberapa hal di dalam masalah keuangannya. Harus *diberesin* Bulognya dulu, Pak, Bulog belum selesai, lalu ada ID Food, Pak.

Di Bulog itu, Bapak, ada Rumah Pangan. Rumah Pangan itu bermitra dengan masyarakat. Ada sistem yang baru saja berubah saya kira ya, setelah pergantian dirut yang baru ini kalau saya tidak salah. Saya mendapatkan laporan dari mitranya Rumah Pangan kita, bagaimana pangan itu sekarang, mereka kalau membeli sebagai distributor masyarakat, harga kuotanya sangat dibatasi dan harus ditambah beras, ini khusus untuk beras, Pak, beras itu mereka harus ditambah tepung, tepung beras, dan sebagainya, yang mana orang enggak beli *gitu*. Jadi saya kira, distribusi, kalau *hilirisasi*, saya tidak menyoroti *hilirisasi* soal pertambangan, tapi *hilirisasi* pangan menjadi penting. Dan saya mengancam keras kalau ada yang mengatakan, "Oke, beras naik," ya kita kasih dukungan buat petani. Pertanyaannya, beras itu adalah beras impor atau beras yang dihasilkan oleh petani kita? Berikan kami data yang detail, Bapak, ya. Kalau kemarin Kementerian Perdagangan tidak bisa,

mungkin dari Kementerian BUMN, saya kira diintegrasikan, kita bisa dapat data yang lebih baik.

Yang terakhir adalah mengenai, tadi mengenai pangan, *statement* saya tetap sama. Bapak, tolong kita berjuang bersama, turunkan harga sembako, Pak, terutama beras dan beberapa komoditas lainnya.

Yang terakhir adalah mengenai Waskita Karya dan juga Wijaya Karya. Saya tadi mendengarkan ada privatisasi, ini mohon untuk perhatian, tidak bisa serta-merta ada masalah lalu IPO, privatisasi, menjadi salah satu solusi, tentu kita membutuhkan pendalaman, tidak di forum ini.

Mengenai Waskita Karya, saya mohon catatan tertulis, Bapak. Waskita Karya, ini kita juga jangan tidak sensitif, tidak menutup mata juga bahwa ada beberapa kasus besar tunggakan Waskita Karya, hutang-hutang Waskita Karya. Apakah permintaan PMN ini, suntikan dari APBN terhadap Waskita Karya? semoga tidak ya, semoga tidak. Saya harap tidak, tidak untuk melunasi hutang-hutang Waskita Karya kepada perbankan maupun pada vendor-vendor yang menjadi mitra Waskita Karya.

Saat ini saya kira semua informasi serba terbuka dan kita yakin bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik. Sekali lagi, Pak Menteri BUMN dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN, selamat berjuang, kita *insya Allah* bisa berjuang bersama. Sekali lagi, selamatkan dana di PT Taspem, kita bongkar, siapa pun yang terlibat, tidak hanya di Kementerian BUMN, tidak hanya di entitas Taspennya. Tetapi juga kita desak. Kalau ada orang di Kementerian Keuangan oknum yang selama ini mengatur investasi di Taspem atau di industri keuangan BUMN, saya kira orang itu juga harus diperiksa dan salah satunya juga terindikasi kuat terlibat di dalam kasus BTS PT Telkom, karena yang bersangkutan menjabat sebagai salah satu komisaris.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Kami persilakan, Ibu Melani.

F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Erick dan jajarannya, juga
Para Dirut Karya yang hadir hari ini,**

Terima kasih kesempatannya, tadi sudah banyak yang ditanyakan oleh teman-teman, tetapi sebelumnya saya juga akan mengapresiasi kerja dari Pak Menteri yang telah menghasilkan kinerja positif untuk laba konsolidasi BUMN, mudah-mudahan yang 2023 itu bisa naik, nanti 2024 juga lebih bagus lagi.

Sudah banyak mungkin yang disoroti oleh teman-teman, tapi saya ingin menanyakan tentang BUMN sektor mode transportasi udara. Dari yang saya ketahui, PT Angkasa Pura AP1 dan AP2 telah resmi melakukan *merger* setelah Kementerian BUMN melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney membentuk PT Angkasa Pura Indonesia pada 28 Desember 2023 yang lalu. Dikatakan, InJourney akan berada di urutan kelima pengelola bandara terbesar di dunia dengan 172 juta penumpang per tahunnya, yang mengalahkan operator bandara lain seperti Vinci Airports asal Prancis atau GMR Airport asal India. Dengan telah dilakukan *merger* tersebut, dari perspektif Kementerian BUMN, seberapa jauh strategi ini akan membuat pengelolaan bandara menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan di bandara? Apakah ada parameter khusus untuk mengukur peningkatan efisiensi tersebut ke depannya?

Dan juga pasca dilakukan *merger* ini, lebih khusus lagi, bagaimana manfaat langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat pengguna bandara, misalnya untuk menghadapi musim mudik atau *peak season* pada saat arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2024 ini? Apa konkretnya peningkatan kualitas layanan dan juga efisiensi pengelolaan bandara yang diharapkan, yang akan dirasakan oleh masyarakat? Dan bagaimana *merger* ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan perseroan ke depannya, berapa potensi laba yang ditingkatkan ke atas efisiensi yang akan dicapai?

Masih terkait efisiensi, bagaimana pula ke depannya *merger* ini akan berdampak secara langsung dalam mengoptimalkan sinergi sektor logistik nasional, khususnya sektor pengangkutan udara? Sebab beberapa waktu yang lalu laporan dari *World Bank* diketahui bahwa, indeks performa logistik kita sempat turun dari peringkat 46 ke urutan 63 tahun 2023. Yang lalu, dengan Singapura yang ada diposisi pertama dan Jepang di peringkat ke-15. Untuk itu ke depannya, bagaimana langkah *merger* ini dapat dilakukan secara efisien untuk meningkatkan kinerja logistik kita dalam pengangkutan udara, serta meningkatkan peringkat tersebut?

Selain itu juga kedua, saya ingin menanyakan strategi Kementerian BUMN untuk terus meningkatkan TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri, di BUMN-BUMN. Yang saya *tau* bahwa, Pertamina telah menjadi kontributor TKDN terbesar di tahun 2023. Lebih spesifik lagi, pada 2023 Pertamina menjadi kontributor TKDN terbesar, berkontribusi hingga 50% total TKDN. Bagaimana, Pak Menteri, untuk meningkatkan pembinaan di tempat BUMN-BUMN yang lain? Sebagai contoh juga bagaimana strategi penguatan TKDN yang lebih mendorong BUMN Karya termasuk Utama Karya yang, yang nantinya akan mendapat juga PMN yang menjadi pembahasan hari ini, bagaimana untuk rencana peruntukan PMN itu dapat juga lebih meningkatkan

TKDN yang menjadi prioritas seiring dengan penggunaan PMN tersebut? Dan juga untuk Pak Menteri lebih memastikan agar komitmen kebijakan penguatan TKDN di PMN BUMN dapat terus terjaga, termasuk di dalam pemerintahan nanti yang mendatang.

Saya juga ingin menanyakan berkaitan dengan progres BUMN dalam hal terkait pengerjaan proyek-proyek di IKN. Dari yang saya ketahui, 29 Februari sampai 1 Maret, Kementerian BUMN telah melakukan *ground breaking* beberapa proyek BUMN di sana, di antaranya tiga Bank BUMN yaitu, BNI, Mandiri, BRI, juga proyek Telkom Smart Office yang akan menjadi pusat penyediaan infrastruktur dan layanan digital di IKN. Ke depannya bagaimana persisnya pengembangan BUMN yang telah dilakukan *ground breaking* tersebut, apakah akan menjadi kantor pusat dari BUMN atau bagaimana?

Dalam tahap pembangunan IKN mendatang yang melibatkan Kementerian BUMN, mana saja yang akan dipersiapkan untuk menyusul dilakukannya *ground breaking*? Di sisi lain, di DKI Jakarta, bagaimana juga dengan langkah Bapak Menteri BUMN untuk terus melakukan konsolidasi aset, termasuk aset-aset BUMN di kawasan Monas.

Dari yang saya ketahui bahwa Pak Menteri sempat menanya, mengatakan, bahwa aset-aset ini akan dikonsolidasikan bawah *property fund*. Oleh karena itu, seiring dengan terus berlangsungnya pengembangan IKN, bagaimana proses dari tahap konsolidasi aset-aset BUMN tersebut hingga saat ini? Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Pak Gde Sumarjaya Linggih.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Akhirnya.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI,

Di mana cerdas dan trengginas, hampir semua sekarang ini Pimpinan Komisi VI adalah suara tertinggi di dapilnya, kecuali Mas Bimo, karena menjaga etika, katanya.

Yang saya hormati rekan-rekan Komisi VI, begitu juga Pak Menteri beserta jajaran,

Tadi teman-teman bicara tentang PMN tentunya pada bahasan hari ini, kemudian Pak Menteri juga sempat menyampaikan tentang deviden dengan PMN. Seperti di awal, sebenarnya kami ingin mendalami PMN ini nanti, bukan hari ini sebenarnya, tapi teman-teman sudah banyak mendalami hari ini, tapi saya hanya ingin sekarang memberikan gambaran secara makro *aja*, Pak Menteri. Awal-awal, kebetulan saya 15 tahun di sini. Jadi awal-awal Kementerian BUMN ini adalah aksi korporasi yang diutamakan, sehingga kita ada privatisasi dan sebagainya, yang akhirnya tentu adalah ke *profit oriented* yang akhirnya menyebabkan adanya anak cucu yang banyak, karena menggelembung ya, kemudian diharapkan partisipasi dari masyarakat pada saat itu, itu melalui IPO ya, yang ternyata itu hanya segelintir orang yang memang mengerti tentang jual beli saham ya. Saya pikir itu tidak membangun sebenarnya, sehingga kita ada perbaikan lagi kemudian menjadi *agent of development*.

Agent of development zaman Bu Rini hanya didengang-dengungkan saja tapi tidak dilaksanakan, *agent of development* ini. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Erick, di zaman Pak Erick hari ini, *agent of development* itu dilaksanakan dengan baik ya, bahkan sampai ke *squeezing* semuanya BUMN yang ada, dan *role*-nya kembali kepada yang saya ketahui secara teorinya secara yang pernah saya baca, sering saya ungkapkan di sini bahwa BUMN itu sebenarnya boleh beroperasi di empat hal, pertama adalah *security reason* ya, artinya untuk menjaga keamanan seperti Pindad, mungkin, Peruri mungkin, yang kedua adalah kalau itu *too big provided third party*, kalau terlalu besar bagi swasta, nah, yang ketiga itu adalah membangun *depressed area*, daerah-daerah tertinggal, kita lakukan sekarang di Labuan Bajo dan sebagainya. Kemudian yang keempat, membawa misi pemerintah, ya ada Bulog dan sebagainya, nah itu *agent of development*.

Tapi sekarang ini berkembang lagi, Pak Menteri, ada yang tertinggal, Pak Menteri, dari kita melakukan *agent of development* itu, walaupun Pak Menteri sudah men-*squeezing* benar ini dan itu perlu *effort* yang benar-benar keberanian yang luar biasa untuk melakukan itu, karena banyak hal yang menghambat sebenarnya, posisi Pak Menteri melakukan *agent of development* tersebut. Hal yang baru yang berkembang yang sekarang saya sempat dengar di beberapa tempat teman-teman saya berdiskusi adalah bagaimana kita melakukan *stakeholder base approach*, jadi semua akan bisa terakomodasi. *Stakeholder base approach* ini adalah bagaimana kita melakukan pertumbuhan dengan pemerataan dan timbul pelaku baru dan partisipasi dari masyarakat tersebut ada. Nah, ini kalau kita membangun tapi kemudian pertumbuhannya tinggi, masih banyak yang tertinggal, makanya banyak gini rasio yang masih terjadi, terutama di daerah-daerah.

Oleh karena itu saya minta Pak Menteri, ini kembali kepada *stakeholder base approach*-nya itu. misalnya ya salah satu contoh mungkin yang paling gampang sekarang ini di Bali ada IHC, Pak. IHC ini selama masih ada orang-orang Balinya yang mampu, nah itu harus mereka yang dilibatkan, sehingga mereka tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Katanya *hilirisasi*, *hilirisasi* bukan hanya tambang, Pak Menteri. *Hilirisasi* inii termasuk juga *hilirisasi* terhadap SDM-nya. Selama SDM-nya di situ mampu, ayo kita pakai

SDM tersebut *gitu* ya. Kalau enggak nanti ini penyebab daripada, kalau dulu mungkin zaman Pak Harto, harus kita menyebarkan orang-orang Balinya harus pindah ke dari mana-mana, ke pulau Sumatera, ke pulau Jawa, *gitu* untuk pemerataan. Tapi kalau sekarang, kalau tidak membangun daerahnya, hanya mengambil sumber daya manusianya, cuma mengambil sumber daya alamnya, sumber daya manusianya tidak diambil, maka akan terjadi kesenjangan, kesenjangan ini adalah bibit daripada kita NKRI kita terganggu, itu *udah* pasti, Pak. Dan itulah program Pak Jokowi, sehingga terbangunnya IKN sekarang ini untuk *hilirisasi* tersebut *gitu*.

Nah, di Bali ini saya melihat begitu, karena saya melihat ada tiba-tiba yang menjadi *top* di situ adalah Pak Nicolas, apa namanya itu, yang apa mengundang beberapa yang luar negeri yang hampir-hampir mirip ininya, apa namanya, kemampuannya *gitu*. Kalau *oke*, mengambil luar negeri boleh saja karena itu KEK, tapi kalau memang dia mempunyai lebih kemampuan atau mempunyai, mungkin dia berasal dari sebuah rumah sakit yang *top* di luar negeri, itu *oke* sebagai bahan untuk kita memberikan *mindset* yang berubah terhadap pelayanan kesehatan di Bali. Kalau enggak, ya pakailah itu yang di Bali itu, ada ya, kalau kita ngomong di, di, di, di ahlinya mungkin ada, kalau memang benar-benar perlu ahli benar, ada Profesor di UI itu Profesor Andri Lubis mungkin ya, atau kalau memang ada di, di Bali ya dokter Win itu juga termasuk yang cukup mumpuni untuk hal-hal demikian itu, itu saya harapkan.

Yang kedua, saya harap juga *hilirisasi* ini adalah mungkin di AP1 misalnya, karena ketika saya bicara Bali ini, karena sumpah saya waktu dilantik adalah memperjuangkan daerah pemilihan, jadi itu. AP1 misalnya, Pak, ya. Bagaimana sekarang itu mengurangi oligopolinya di situ, karena itu-itu juga orang yang dapat. Dan saya melihat, bukan berarti kita anti daripada *free trade* tapi kita *state*, *state interest* harus kita dahulukan sekarang ini.

Amerika yang tadinya bicara tentang *free trade*, mereka sudah NAFTA bubar *gitu* ya, yang lain-lain mereka mundur itu, yang tadinya *free trade* itu ada di Amerika *kan*, itu yang mendengungkan pertama. Oleh karena itu, maka tolong dikurangi ya memang ada kompetisi, kompetensi dari apa produk ataupun yang bisa ditawarkan di, untuk yang tidak memakai *brand* internasional, itu kenapa kita tidak mulai kita dorong itu? Tujuannya apa? Justru kita ingin menjajah negara lain, ketika *brand* ini bagus, *franchise*-nya mulai banyak, kita ingin menjajah negara lain melalui penjajahan modern, penjajahan apa? Penjajahan ekonomi. Penjajahan ekonomi apa? *Franchise*, Pak Menteri ya, di samping *capital flight* kita tidak ada *gitu*, untuk kondisi sekarang ini. Nah, itulah mungkin perbaikan, mungkin pada saat ini diberikan *privilege* barangkali sedikit, kalau enggak diberikan *privilege*, ya kalau itu sama kualitasnya, kondisinya sama, mau bayarnya sama, ya sudah berikan yang lokal, *gitu*, ya *kan* itu yang ini, ini yang harus diperhatikan betul, karena ini untuk kepentingan kita ke depan. Mungkin kalau ya kelihatannya remeh tapi untuk masa depan, ini akan membangun perekonomian kita lebih kuat dan mempercepat kita menjadi negara yang lebih berkelas, lebih maju nantinya ke depan kalau kita sama-sama.

Nah, inilah saya minta, di samping memang AKHLAK yang di, di, di dengungkan oleh Pak Menteri ini, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan daripada *state interest* kita, letaknya *kan* di situ. Bagaimana kita membangun orang-orang yang di daerah-daerah tersebut *gitu* ya, tidak hanya mengeruk sumber daya alamnya ya. Bali ini *kan* sumber daya alamnya adalah manusianya adalah budayanya, kemudian menjadi *tourism*, kemudian setelah menjadi *tourism* kemudian rakyatnya mau menonton saja, *kan* lucu *gitu*, ini, ini menjadi perhatian. Makanya saya berpikir kita mulai ke depan adalah *stakeholder base approach*, Pak Menteri. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan. Dan kebetulan di sini banyak direksi, saya mohon untuk pertimbangkan untuk membangun daerah tersebut, menggali di daerah tersebut, ya tentu harus dilibatkan sepanjang di daerah tersebut ada kemampuan masyarakatnya. Kalau enggak, ya tentu ini akan bibit-bibit perpecahan kita di masa yang akan datang, kita akan ikut nanti menjadi dosa sejarah bagi kita untuk ke depannya.

Itu harapan saya ke Pak Menteri dan kita enggak boleh dalam kemajuan Indonesia ini, kalau Pak Luhut bilang, "*Nobody left behind*", katanya, jadi tidak boleh ada orang yang tertinggal dalam kemajuan negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam, berlimpah dari bawah tanah, di atas tanah, di lautan ada, matahari sepanjang tahun, ya dengan pasar yang sekarang sangat luas, pasar kita hampir 275 juta ini, tentu ini akan menjadikan kita *survive* ke depannya lebih cepat, asal salah satu dari dengungkan, yang di dengungkan oleh Pak Menteri yaitu, AKHLAK itu berjalan dengan baik dan BUMN merupakan kunci daripada sebagian kemajuan kita di Indonesia ini. Itu barangkali, Pak Pimpinan.

Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melakukan ibadah puasa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih.

Selanjutnya, Pak Edhie Baskoro Yudhoyono, Pak Ibas.

F-PD (Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com., M.Sc.):

Terima kasih.

**Pimpinan dan teman-teman Komisi VI yang terhormat,
Menteri BUMN dan jajaran Kementerian BUMN,**

Pertama mengenai pangan, pupuk, Bulog dan ID Food, bahkan urusan mudik hingga harga-harga sembako menjelang Idul Fitri sudah dibahas. *Fraud* Taspen, Asabri, dan Jiwaseraya pun sudah juga disinggung, pesannya, tolong diberesi, Pak.

Pak Menteri, yang kedua, tidak ada salah dengan negara berbisnis melalui *state on enterprises*, hanya saja bisnis BUMN yang sehat itu harus memberikan manfaat terhadap ekonomi bangsa dan kehidupan rakyat, tentunya. Agresivitas negara melalui investasi, alokasi anggaran PMN terhadap BUMN sangat diperlukan, sejauh itu memberi *benefit* secara korporasi dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Saya rasa cukup masuk akal dengan kucuran dana besar, 80 triliun *plus minus*, dalam kurun 2 tahun terakhir ini kita telah menghasilkan dividen yang baik, *plus minus* 50 triliun, apresiasi kepada Kementerian dan Pak Erick beserta jajarannya. Menjadikan korporasi kita lebih sehat, hutang kita lebih terkendali, pajak masuk dan adanya *multiplier effect* ekonomi dalam setiap proses aksi korporasi tersebut, sehingga saya mendukung agar setiap PMN yang masuk benar-benar tepat sasaran.

Saya juga mengingatkan kepada Kementerian Keuangan, agar juga melakukan alokasi PMN lebih tepat sasaran. Akan tetapi PMN dan BUMN yang masih sakit bisa dipertimbangkan untuk dibubarkan, dengan catatan ya Pak Menteri pastikan ada solusi lanjutan agar para pekerja tidak kemudian menjadi pengangguran baru dan hutang-hutang akibat salah aksi dalam korporasi juga tetap dipertanggungjawabkan, bukan sekedar menjadi beban negara kemudian hari.

Saya juga turut mengikuti bagaimana Kementerian BUMN merancang *roadmap* yang disebut menjadi langkah strategis untuk mengarahkan transformasi dan konsolidasi perusahaan, dengan jumlah BUMN sekitar 30 hingga 40, yang saya rasa itu cukup ideal bagi negeri kita. BUMN ke depan harus lebih sehat, inovatif, dan solutif untuk menjawab kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya juga terus berkontribusi untuk ekonomi nasional.

Mengenai privatisasi atau *right issue* Wijaya Karya, saya ingin mengetahui sebetulnya alasan di balik rencana ini dan bagaimana rencana ini diharapkan untuk memperkuat posisi perusahaan tersebut di pasar. Jangan sampai salah dalam melakukan aksi.

Pak Menteri, saya juga sangat setuju dengan langkah mengurangi lemak, *trimming the fat*, yang kurang bermanfaat dan justru berisiko mengganggu kinerja BUMN, sehingga PMN untuk Hutama, Waskita dan Karya-Karya yang lain, pastikan itu betul-betul menyehatkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran, termasuk untuk bayar hutang. Karena saya juga masih mendengar Karya-Karya kita ini dalam membayar terlambat dan bahkan bisa merugikan pihak-pihak ketiga dan pada akhirnya, jika semua pengelolaan itu menjadi lebih baik dan lebih benar kualitas dan kinerja BUMN tersebut lebih berkualitas sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Sekian dari kami.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Selanjutnya Pak Hasim, Pak Nasim.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Iya, siap. Terima kasih, Pak Bimo.

**Pak Sarmuji, dan
Semua rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami banggakan juga,
Pak Menteri BUMN, Pak Erick yang harapan kami jadi kebanggaan,**

Ada salah satu bahasa, Pak Erick, yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali, oleh Imam Ali mengatakan, kalau kita kehilangan harta benda di dunia ini, itu hanya hilang, bukan hilang apa-apa ya, itu ya? Nah, kalau kayak Pak Khilmi kehilangan pupuk *aja* udah stres, itu yang pernah dikatakan Sayyidina Ali. Tapi kita kehilangan separuh, sebagian kesehatan kita itu adalah hilang sebagian saja, tapi kalau kita sudah nilai akhlakul karimah hilang, itu maka akan hilang seluruh hidupnya. Itulah BUMN yang kita harapkan menjadi AKHLAK BUMN yang terbaik ke depan, yang pasti jujur.

Kami Komisi VI, saya, atas nama Fraksi PKB mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap BUMN, yang selama ini menjadi mitra kami terbaik sehingga dalam sejarah Indonesia, Komisi VI menciptakan 80% sukses dalam Pemilu 2024 yang sangat brutal ini, iya *kan*, walaupun brutal tapi sukses Komisi VI, 80%. Ini menjadi catatan, Pak Menteri ya. Di Komisi VI ini sejarah 80%, mulai dulu tidak pernah terjadi. Dan tidak bisa lepas, jujur, tidak bisa munafik, tidak bisa menutupi, bahwa ini tidak lepas dari peran serta mitra kita dari BUMN, itu yang pertama, itu yang pasti. Apresiasi itu kami ucapkan, kalau kita berbicara tentang laba, deviden juga menciptakan sejarah, Pak Erick menjadi menteri sudah luar biasa, itu yang kami ucapkan sangat terima kasih, jujur.

Lalu yang pertama, apresiasi kita juga sudah ternyata terbukti. Surat Edaran Kementerian ya, kalau kita mencari kesalahan tidak akan selesai-selesai. Tapi jelas di sini ada Surat Edaran Menteri BUMN tentang Netralitas BUMN dalam Pemilu 2024 dan itu belum pernah terjadi dan oleh menteri yang lain, ini yang harus kita apresiasi, iya *kan*. Seandainya terjadi ya, ya, seandainya terjadi mau itu dari Pertamina, terjadi dari pupuk, terjadi dari apa itu manusia, itu namanya manusiawi ya, bukan dari BUMN tapi dari SDM-nya ya, kalau katanya orang Jawa ya biadab tapi beradab *gitu lah ya, yo ngono* tapi *ojo ngono-ngono ya kan*, tapi BUMN jelas *gitu*.

Yang kedua, BUMN pangan, di BUMN justru membantu pemerintah. Itu jelas. Bapak Presiden Jokowi harus berterima kasih kepada Menteri BUMN karena pemerintah sudah penyediaan bansos, termasuk kepada Elnino dan lain-lain yang sudah tersebar kepada masyarakat dan itu hak masyarakat, bukan masyarakat miskin. Tapi Pemerintah menggunakan rakyat, menggunakan dana rakyat untuk masyarakat kembali ke masyarakat,

dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan milik pribadi atau golongan, bukan milik presiden, bukan milik pemerintah, tetapi itu adalah milik rakyat yang dikembalikan kepada rakyat kita. Dan itu jelas dari Bansos yang dilakukan oleh bersama-sama BUMN kita, itu, terima kasih.

Yang ketiga BUMN perbankan ya *kan*, sudah bekerja baik selama ini ya, selama Pemilu yang sempat panas situasi, kondisi negara kita, ya *kan* dalam pemilu ini, sehingga ekonomi tetap terjaga di Himbara khususnya, itu menjadi catatan yang tidak bisa kita *munafikin* iya *kan*, itu tercatat.

Yang keempat, BUMN berhasil mencatat laba dan deviden, itu sudah tadi dijelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi dan itu suatu prestasi yang luar biasa.

Yang kelima, BUMN telah menjadi pionir yang selama ini menjadi tekanan dari pemerintah Jokowi yaitu TKDN tertinggi di Indonesia yang selama ini terjadi, itu harus ditandai dan harus diakui ya *kan*, oleh sebelumnya, ya *kan*. Ini untuk menghormati anak bangsa kita bagaimana TKDN, baik itu nanti di seluruh *subholding*, di *holding*, yang betul-betul menjadikan suatu BUMN *government corporate* yang luar biasa kita ke depan nanti.

Saya kira itu Pak Menteri, Pimpinan, saya terima kasih kepada Pak Menteri dan saya berharap nanti ke depan BUMN lebih profesional, lebih berkompetitif dan juga lebih berAKHLAK ke depan.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Luar biasa tausiahnya. Pak Husni.

F-P.GERINDRA (H. M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan seluruh, dan Anggota Komisi VI,

Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir,

Perkenalkan, Pak, ini baru pertama kali kita ketemu, saya H. M. Husni, S.E., M.M., saya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Dapil Sumut 1.

Di sini apa, tentunya Pak Erick Thohir, saya mengapresiasi tentang kerjaan Bapak selaku Menteri BUMN. Kalau menurut saya, sangat amat luar biasa, tidak gampang, Pak, mengurus BUMN dengan berbagai tingkatan SDM-nya. Jadi saya mantan Komisi VIII, Pak, tentunya saya di sini sedikit bercerita bahwa salah satu ya, yang akan BUMN lakukan yaitu Bank Tabungan Negara, yang akan melakukan penggabungan dengan Bank Muamalat. Memang waktu Bank Muamalat diambil alih oleh BPKH, mitra dari Komisi VIII, itu tidak ada rapat dengan Komisi VIII, makanya kami akhirnya tahu bahwa Bank Muamalat itu mempunyai kredit yang banyak yang macet ya, malah ada, kalau BUMN punya Garuda, Bank Muamalat punya Batavia Air yang tidak terbang lagi, Pak. Jadi ini coba di apa, coba dikaji ulang tentang masalah Bank Muamalat yang sampai hari ini memang itu belum sehat, Pak. Dan itu, Bank Muamalat itu dihidupkan daripada dana calon jemaah haji yang daftar tunggunya 5,2 juta orang sampai hari ini.

Kemudian lagi, Pak, tentunya salah satu dulu mitra kami itu adalah penerbangan Garuda. Saya tahu, Pak, waktu tahun 2022 untuk keberangkatan haji pada masa itu, Pak, Pak Menteri, itu memang luar biasa, Direktur Garuda melakukan masalah kesalahan-kesalahan manajemen sebelumnya yang menyebabkan biaya sewa itu naik 1,5 kali lipat yang menyebabkan perusahaan penerbangan merugi dan telah diambil langkah-langkah restrukturisasi yang akhirnya kita tahu bersama-sama bahwa *lessor* biaya sewa Garuda akhirnya turun ya, 37, ada malah yang sampai 70% untuk pesawat berbadan lebar. Ini tentunya kita juga kita berharap bahwa Garuda itu bukan hanya dapat untung, Pak, dari kegiatan jemaah haji saja, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan komersial juga bisa mendapat keuntungan yang lebih baik.

Kemudian, Pak Menteri Erick Thohir, saya juga di sini melihat banyak direktur-direktur BUMN juga yang punya prestasi yang baik. Bapak menerapkan di sini masalah AKHLAK itu juga sangat luar biasa. Saya yang berbasis seorang pengusaha, Pak, saya berbasis pengusaha, tentunya waktu saya mengangkat manajer-manajer saya, pertama saya tanya, "Kamu bisa dapat untung enggak?", "Kamu bisa efisiensi *ndak*, dalam melakukan kegiatan-kegiatan", atau tentunya dia dalam profesional di depan, di bidangnya, Pak Menteri. Ada pepatah Tiongkok mengatakan, rezeki itu datang sebelum ayam pagi berkokok, jadi boleh juga dilihat, jangan sempat direktur-direktur BUMN ini bangunnya mungkin jam 10 dan masuk kantor jam 12 pagi, Pak, kelihatannya itu sangat sederhana ya, tapi ini juga sangat luar biasa.

Kemudian, Pak, tentunya kemarin kami rapat dengan ID, ID Food ya, di sini Bapak akan melakukan pembiayaan lebih kurang 1 triliun. Waktu Direktur ID Food memberikan pemaparan seperti yang Bapak lakukan pemaparan, kertas pemaparan seperti ini, dia kan dia tunjukkan, tokonya ada, Pak, tapi pembelinya enggak ada. Ini yang hal-hal seperti ini sebaiknya, Pak, ya, jangan membebani daripada keuangan-keuangan daripada BUMN itu sendiri.

Kemudian yang terakhir, Pak, yang terakhir, kalau boleh, Pak, itu tol, saya, Dapil saya Sumatera Utara 1, Pak, tapi saya asli orang Aceh, Pak.

Kalau boleh, Pak, tol Aceh itu terus sambung dari perbatasan Sumatera Utara sampai ke Banda Aceh. Tanggung sedikit lagi itu, Pak. Dan saya di Sumatera Utara, tokoh masyarakat Aceh, Pak, di Indonesia ini termasuk tokoh masyarakat Aceh di Indonesia. Ada permasalahan, Pak, di Aceh itu ada tertundanya pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia, ya itu ditunda, Pak, itu kalau boleh itu tolong, Pak, tolong, tolong dilanjutkan. Kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan yang berhubungan dengan masyarakat, *insya Allah*, Pak, *insya Allah*, Pak, saya, Muhammad Husni akan turun tangan untuk membantu memperlancar supaya investasi pabrik semen di Pidie Aceh bisa berjalan baik dan lancar. Itu *aja*, Pak Menteri.

Terima kasih, saya akhiri.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terakhir Pak Husni, eh Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Ya, salah *ngomong*, Pak Ketua.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Pak Menteri beserta jajaran Kementerian BUMN,**

Yang pertama, tentunya saya mengapresiasi terhadap kinerja Pak Erick yang peningkatan trennya luar biasa, saya melihat, kalau kita lihat dari tahun demi tahun terus naik, Pak Erick, ya. Artinya bahwa, termasuk kinerja laba BUMN Indonesia sepanjang tahun 2022 pun nilainya luar biasa, bahkan konon katanya melebihi Malaysia dan Singapura, artinya ini satu hal yang luar biasa, Pak Erick.

Yang kedua, tentu kalau kita lihat lebih dalam lagi, tentu keuntungan terbesar tentu ditopang oleh keuntungan BUMN yang untung seperti Bank Himbara maupun Telkom, Pak Menteri. Di sisi lain kita lihat memang terhadap hal-hal yang menjadi masukan, Pak Menteri ya, terhadap misalnya kita lihat berkinerja BUMN berjasa ya, seperti IFG, Taspen, hingga Asabri ya. Tentu kita lihat apakah ini benar-benar enggak, dalam hal dipersiapkan untuk diperbaiki secara total terhadap kinerja daripada khusus BUMN jasa ini? Karena ini menjadi sorotan, termasuk Asabri, Jiwasraya, biarpun memang kalau kita mau melihat secara jujur, ini bukan di masa Pak Erick, tapi ini sudah terang-benderang kelihatan hari ini dan sudah mulai diperbaiki. Tentu ini menjadi catatan buat kita bahwa kondisi-kondisi khususnya BUMN jasa ini

harus betul-betul didorong kembali *nih*, Pak, Pak Erick, jadi sehingga pelayanan terhadap masyarakat ini bisa, bisa maksimal berjalan.

Termasuk juga misalnya berkaitan dengan PT Reasuransi, apakah masih diperlukan, khususnya berkaitan dengan perhatian khusus ya, termasuk juga berkaitan dengan BUMN Karya, yang hari ini kita tahu betul baik pun Waskita, WIKA, dan lain-lain, beberapa yang kita anggap yang masih sangat sehatlah dan menguntungkan.

Yang kedua, berkaitan dengan BUMN pangan *nih*, Pak Menteri, apalagi ketika tahun ini telah ditetapkan plafon, pinjaman sebesar 28,7 triliun ya kepada khususnya BUMN pangan, baik Bulog maupun ID Food. Yang menjadi catatan buat kita bahwa ketika kita bicara pangan, tidak lepas dengan kondisi yang secara terus-menerus berkaitan dengan apakah kebutuhan Lebaran Idul Fitri, apakah Natal, ini menjadi persoalan terus-menerus. Kita berharap dengan keberadaan BUMN pangan ini juga harus menjadi solusi, misalnya ketika kelangkaan minyak goreng, itu waktu itu Pak Zulhas saya lihat sudah langsung melaksanakan berbagai langkah, menghadirkan Minyak Kita, hari ini kelihatan muncul lagi persoalan beras, persoalan gula. Harusnya ini dengan keberadaan BUMN pangan ini juga harus menjadi solusi, Pak Menteri, apa-apa yang telah dilakukan, sebelum kita lihat dengan *case-case* yang terjadi. Saya yakin kalau ini menjadi persoalan secara terus-menerus, ini saya yakin Pak Menteri mampulah melakukan langkah-langkah konkret, jadi sehingga persoalan gejolak harga beras, gula, yang hari ini sudah mencapai 17.000, bahkan mungkin beras ini tertinggi dalam sejarah, Pak Menteri, harusnya ini enggak perlu terjadi kalau ini betul-betul dikuatkan.

Terakhir, tentu apresiasi Pak Menteri berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia yang menjadi *landmark* hari ini ada di Aceh, Pak Menteri, setelah bubarnya khususnya bank, bank konvensional, dengan hadirnya lembaga keuangan syariah. Tentunya kita berharap hari ini, keberadaan bank syariah ini harus kita jadikan satu *role model*, khususnya ekonomi syariah Indonesia yaitu Aceh. Apalagi saya lihat dibangun gedung yang begitu bagus sebagai simbol ekonomi syariah, bahkan di beberapa negara saya lihat Pak Menteri hadir ya, meresmikan berbagai cabang-cabang baru di Aceh.

Kita tahu betul laporan dari BSI sebelum *merger* menjadi Bank Syariah dari 4 triliun hari ini sudah di angka 102 triliun, artinya ada perkembangan yang luar biasa. Tentu dalam konteks layanan, saya berharap memang hari ini, di Aceh itu dari 1.500 ATM di masa bank konvensional, hari ini sudah 1.200, tahun ini ditargetkan 1.500, tentu juga dengan mesin-mesin ATM yang baru, Pak Menteri, kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk juga keberadaan di tempat-tempat pesantren, di dayah, maupun di tempat-tempat daripada TPI, Tempat Pelelangan Ikan.

Ini beberapa hal, Pak Menteri, menjadi catatan, mudah-mudahan masukan ini terus didorong supaya Bank Syariah Indonesia bisa menjadi *role model* ekonomi di Indonesia, khususnya yang hari ini sebagai *landmark* daripada Aceh.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Demikian pendalaman dari kawan-kawan Anggota Komisi VI, selanjutnya dari Pimpinan, dipersilakan.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya sedikit saja, Pak Menteri, karena yang lain sudah hampir semuanya mencakup penjelasan dari Pak Menteri.

Yang pertama, tentu kami mengucapkan apresiasi atas tercapainya laba yang cukup tinggi di tahun 2023 dan ini tidak mudah di saat perekonomian dunia tidak baik-baik saja, harga komoditas juga tidak lagi mewah sebagaimana setahun sebelumnya, jadi capaian ini patut untuk kita apresiasi bersama.

Yang kedua, saya juga tidak ragu, Pak Menteri ini bisa meng-*generate* BUMN yang baik. BUMN yang baik akan tumbuh dengan tangan dingin Pak Menteri, bisa makin lama makin kuat, makin lama makin besar. Tetapi yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih adalah BUMN-BUMN yang punya potensi *fraud*. Ini sebenarnya sudah pernah saya ingatkan dan hari ini mungkin saya menagih saja, akan perlunya *early warning system* di Kementerian BUMN, bahkan dalam pembahasan anggaran di 2 tahun terakhir, saya selalu mengusulkan agar anggaran di Kementerian BUMN mencakup juga *early warning system* yang bisa dikuatkan di Kementerian BUMN. Harus ada satu tim yang khusus kira-kira mendeteksi sejak awal potensi *fraud* di BUMN-BUMN. *Kan* sebenarnya bisa dipetakan, Pak Menteri. Potensi *fraud* itu misalkan proyek fiktif, seperti yang terjadi di Waskita, yang menurut saya, saya juga sampai sekarang terheran-heran *kok* ada proyek fiktif sampai nilainya triliunan. Kemudian potensi *fraud* yang lain, investasi yang enggak benar, yang *ngawur*, yang tidak memenuhi kaidah kehati-hatian atau *fraud markup* dan sebagainya. Artinya sebenarnya, potensi-potensi itu sudah bisa dipetakan, tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah ada dari jajaran kementerian yang memastikan potensi *fraud* itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, saya ingin tahu ke depan, hari ini apa yang sudah dilakukan, supaya potensi *fraud* itu tidak terjadi, apa yang sudah dilakukan supaya *early warning system* itu bisa diterapkan di jajaran Kementerian BUMN untuk mengawasi potensi *fraud* tadi, misalkan Asabri, Taspen atau potensi munculnya *fraud* yang baru.

Yang ketiga, proses holdingisasi, restrukturisasi, lalu peleburan BUMN, pembuatan BUMN baru, yang barangkali angan-angan kita, bisa menjadikan BUMN kita lebih siap dalam kompetisi global. Misalkan di jajaran InJourney ada perubahan yang sangat fundamental, lalu di PTPN juga ada perubahan yang sangat fundamental. Itu direncanakan dengan satu asumsi bahwa apa yang mau dilakukan itu, itu bisa memperkuat BUMN-BUMN itu. Tetapi namanya asumsi, itu bisa jadi di lapangan berbeda. Bisa jadi ada peribahasa di dalam pembelajaran organisasi itu, obat bisa jadi lebih berbahaya dari penyakitnya. Lalu bagaimana cara kita mengukur tingkat keberhasilannya, Pak Menteri? Karena sekali ini tidak berhasil, sekali ini lewat dari *monitoring* kita, bisa jadi akibatnya sangat luas. Lalu dalam tahapan-tahapan ini, bagaimana kita bisa mengukur proses holdingisasi, peleburan BUMN, lalu *merger* BUMN itu meyakinkan kita bahwa itu berhasil pada tingkat yang kita inginkan. Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri, apa yang sudah dilakukan, cara *monitoring*-nya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, agar apa yang kita angankan itu berhasil.

Barangkali itu saja, Pak Menteri. Terima kasih. Sekali lagi apresiasi atas apa yang sudah dicapai, mudah-mudahan ke depan BUMN kita bisa menjadi lebih sehat dan lebih kuat lagi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Pak Menteri, saya mau, mau minta penjelasan dulu terkait materi rapat hari ini, mengenai PMN yang diusulkan tahun 2024 dari cadangan pembiayaan investasi. Jadi ada, ada perubahan dari rapat kita, Selasa, 19 September 2023 yang menyangkut, sebentar, rapat tanggal 14 September 2023, yang waktu itu PLN masih Rp5.860.000.000.000,00. Nah, sekarang PLN tidak ada, Pak, ya? yang dulu ada? sekarang tidak ada? tidak ada.

Kemudian dari PT Industri Kereta Api sebesar Rp1 triliun dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, sekarang menjadi 2 triliun? *Oke*. Kemudian di sini, Pelni tetap, ID Food yang waktu itu sekitar diajukan Rp832 miliar sekarang menjadi 1 triliun? *Oke*, saya hanya menegaskan dari perubahan dari rapat tanggal Kamis, 14 September 2023 ke rapat hari ini, jadi ada perubahan, nanti akan kita masukkan dalam kesimpulan rapat.

Kemudian yang saya mau minta realisasi Rapat Kunjungan Kerja Komisi VI ke Yogyakarta tentang Realisasi Kredit Macet UMKM Korban Gempa yang dulu disetujui untuk diselesaikan, itu mohon perhatian dari Kementerian BUMN, masih ada sekitar 1,1, intinya 2,2 yang waktu itu dihadiri oleh Pak Arya Sinulingga, mohon ikut dibantu segera penyelesaiannya, waktu Kunjungan Kerja Komisi VI ke Yogyakarta. Yang terkait, oh tinggal 1,8 miliar, Pak Arya. Ada 22 UMKM yang akan diselesaikan dengan bantuan CSR dari kunjungan kerja kita ke Yogyakarta tahun 2000, November 2022, ada surat masuk ke Komisi VI. Saya kira itu yang dari saya.

Kemarin kita rapat dengan beberapa BUMN pangan, Pak Menteri, saya kira ada hal yang lebih serius, tadi teman-teman menyarankan situasi krisis pangan dalam artian ketersediaan beras terutama dan kelangkaan, saya kira BUMN perlu lebih proaktif terkait dengan kelangkaan tersebut. Dan kami minta supaya dari hulu, hilirnya ada semua di BUMN, kita *ndak* ingin seperti teman-teman katakan menjadi pemadam kebakaran, ada peran Bulog, ada peran PT Pupuk, kemudian ada peran dari ID Food, dan juga dari peran PTPN. Kami berharap deputi atau wamen terkait perlu mengkonsolidasikan, mengkolaborasikan dengan berbagai pihak, karena kelihatannya kalau kita lepas ke pasar, kita lepas begitu saja masalah perberasan maupun pangan ini tanpa ada satu intervensi atau peran kuat pemerintah, dalam hal ini BUMN, kita tidak yakin standar permainan *private*, baik itu di dalam distribusi maupun pengadaan ini akan cenderung dalam hukum bisnis.

Nah, kami berharap seperti tadi teman-teman sampaikan, Kementerian BUMN pernah *leading* dan *leader* dalam menangani masalah Covid, maka dalam hal ketersediaan dan harga pangan kali ini, Komisi VI mendesak kepada Kementerian BUMN untuk benar-benar mencermati dan mengambil langkah-langkah yang serius untuk pengamanan terutama cadangan beras nasional, ada kecenderungan kalau *state capital* tidak *leading*, akan, permainan kartel dan permainan pemburu rente ini akan memanfaatkan situasi yang ada. Gejala-gejalanya jelas, dalam keadaan beras langka atau komoditas langka dibarengi harganya komoditas, mahal nya harga komoditas, di situ pemburu rente dan peran kartel akan-akan mempermainkan situasi dan situasi ini hanya akan bisa diintervensi oleh kekuatan negara atau kekuatan BUMN.

Ini yang kita harapkan bagaimana peran BUMN di dalam mengatasi krisis pangan atau kalau dikatakan belum krisis, akan ada kecenderungan ke krisis, dengan langkanya di beberapa tempat, seperti di retail-retail modern dan diikuti dengan tingginya harga pangan.

Demikian dari kami, Pak Menteri, pertanyaan, pendalaman kawan-kawan begitu banyak, kami persilakan untuk direspons mana-mana hal yang penting. Kemudian kiranya perlu dijawab secara tertulis, kami tunggu untuk jawaban tertulisnya, namun sebelumnya hal yang penting-penting terutama problem-problem faktual yang ada, kami persilakan untuk segera direspons, waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Terima kasih.

Pimpinan dan para Anggota Komisi VI yang terhormat,

Tentu tadi sudah dijabarkan oleh para wakil rakyat, bagaimana tentu masukan dan saran. Dan tentu pasti kita akan lakukan *follow up* untuk penyelesaian-penyelesaian sesuai dengan arahnya.

Tentu tadi selalu *kan* dinamikanya mengenai posisi BUMN ini perannya di mana, itu selalu konteksnya. Sebenarnya kita sudah membahas cukup panjang ketika kita bicara mengenai RUU BUMN yang selalu kita ulang-ulang lagi sampai hari ini. Dan kita lihat begini, bahwa Indonesia sendiri hari ini *kan* sudah dalam posisi *market* yang terbuka. Artinya apa? Ada peran dari pihak *private* sektor yang makin hari makin besar, ada juga perlu yang namanya investasi asing, lalu juga ada perannya BUMN. Tentu konteksnya ketika bicara BUMN, kita coba mengklasifikasi lagi seperti apa *sih rule of the gamenya* buat BUMN. Ya memang selalu dibidang kita ini adalah *agent of development*. Nah, ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Demer misalnya, bagaimana kita bisa melihat jadi *stakeholder approach*-nya, apa juga atau yang kita namakan hari ini, kita samakan juga di Kementerian BUMN, sebagai *economy development*, karena suka tidak suka, sebuah pertumbuhan itu terjadi di wilayah yang memang harus kita tumbuhkan.

Nah, contoh aja misalnya program yang kita bicarakan The Sanur itu. Kita tahu kita *approach*-nya tidak hanya sekonyong-konyong kita datang karena seakan-akan kita punya aset saja, tetapi kita lihat memang Sanur ini salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang dulu pernah dilahirkan, tetapi tidak ada investasi baru. Nah, di situlah kita melihat ternyata kita punya aset yang The Sanur, dan kita bisa melihat bagaimana kalau kita bangun bisa *create value*, tidak hanya untuk *stakeholder*, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi Sanur, tapi khususnya juga secara luas, untuk Bali. Dan tentu posisinya yang kemarin kita pikirkan, memang sebagai titik yaitu bagaimana kita juga mengintervensi yang namanya tentu kesehatan kita, yang hari ini tentu lebih banyak masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk *middle class* untuk mengadakan perobatan, nah, *balance-balance* seperti ini yang memang kita lakukan.

Atau juga yang selalu kita bilang konteksnya, apakah BUMN ini memang harus untung atau rugi? Tetapi *in realita* sebagai sebuah perusahaan kita harus juga memberikan fiskal kontribusi kepada negara, itu yang konteksnya. Apakah kita berbisnis dengan rakyat? tidak. Tetapi apakah kita harus menjadi bagian fiskal kontribusi buat negara? Iya. Itu yang kita lakukan, kenapa misalnya kita mengadakan dividen, ataupun yang namanya PNBK, pajak, dan lain-lain. Dan ini juga membagi bagian kontribusi yang di mana kita hadir sebagai perusahaan yang dimiliki negara.

Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya yang selalu kita bicara dari tadi adalah *people's economy*, di mana *sih* peran BUMN? Memang konteksnya beda-beda. Kalau kita bicara tadi di sampaikan mengenai Himbara, Himbara sudah *proven*, dia itu bisa bersaing di *market* terbuka dan bisa mulai juga mengimbangi peran daripada *private sector* dan investasi asing, kita bisa lihat bagaimana *ranking* bank-bank Himbara sangat *solid* dan sangat kuat, ditambah lagi tentu dengan penggabungan tadi, anak perusahaan Himbara seperti BSI, yang sekarang sudah masuk bahkan 10 bank syariah terbesar di dunia secara *market capitalization*, itu, itu sudah terjadi konsolidasi di Himbara.

Nah, apakah ini bisa di *applicable* dengan BUMN-BUMN lain? itu yang menjadi *challenge* kita, menjadi *challenge* kita, bagaimana kita coba bisa

kontribusi. Dan di situ sendiri kalau kita lihat, apakah Himbara sudah memainkan peranan penting untuk *people's economy*? sudah. Karena 92% pendanaan itu ya itu dari UMKM, yang kita lakukan sekarang, maksud saya, pendanaan UMKM 92% itu dari Himbara pada saat ini. Dan memang tadi bicara mengenai hapus buku, ya sama konteksnya, itu diskusi 1 tahun yang lalu, yang sekarang sendiri PP2SK sudah mengeluarkan aturannya yang kita lagi pelajari, karena ini juga bagian kita mendorong, kalau yang besar-besar *aja* direstrukturasikan, kenapa yang kecil-kecil tidak direstrukturasikan? Ini yang kita dorong, kenapa juga kenapa kita mengambil peran cukup signifikan di masalah Undang-undang Hapus Buku ini, yang sekarang masih digodok dan kita sedang menunggu implementasinya seperti apa.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sedikit tambahan, Pak Menteri, mengenai, sambil menunggu tentang peraturan hapus buku, hapus tagih. Keluhan dari para pelaku UMKM di bawah itu, semakin, semakin kejam ini Himbara. Banyak laporan-laporan yang harusnya masih bisa ditunda untuk menunggu keputusan daripada pemerintah, yang terjadi justru di bawah ini mempercepat pelelangan-pelelangan yang ada. Nah, kita berharap ada restrukturisasi, ada mitigasi yang lebih dalam pada pelaku UMKM, khususnya di bank-bank Himbara untuk pelaku UMKM-nya.

Terima kasih.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Baik dan tentu tadi disampaikan juga mengenai tentu apa program-program yang kita dorong. Seperti di Karya kan hari ini kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan 7 Karya menjadi 3 perusahaan Karya yaitu, dengan penggabungan yang namanya Adhi Karya, dengan tentu Nindya dan, Brantas, Adhi dan Nindya Karya, lalu HK dengan Waskita, dan juga PP dengan WIKA, ini salah satu konsolidasi penyehatannya. Dan kita juga sudah mulai mengklasifikasi daripada tentu Karya-Karya ini menjadi pengelompokan-pengelompokan, supaya mereka bisa fokus kepada tugasnya masing-masing.

Misalnya contoh di HK dan Waskita itu, mereka akan fokus kepada jalan tol, non-tol, non-tol dan *institutional building* dan juga *residential commercial*. Tetapi untuk WIKA dan PP dia tidak masuk ke *toll roads*, tapi dia fokus kepada *seaport*, *airport*, tapi juga dia akan tetap masuk di *residential*, karena memang masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya.

Lalu juga untuk misalnya penggabungan Adhi Karya, Nindya Karya, mereka akan fokus kepada air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lagi, ini yang kita lakukan sebenarnya konsolidasi sekaligus penyehatan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pak Menteri, sedikit.

Terus yang IPC-nya *gimana* itu, Pak? tadi saya dengar enggak ada disebut, yang IPC siapa yang akan.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Ada, masuk di dalam sini, Pak. Ada WIKA dan PP di sini, ini tadi saya cuman membacakan sebagian saja yang memang ada di, di diagram yang sedang kita coba lakukan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Menurut saya perlu, karena dalam kondisi Rekind belum terselamatkan, saya kira itu jangan dilupakan.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Sudah, Rekind sudah restrukturisasi kemarin, sudah selesai.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya, tapi *kan* belum.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Oh, belum dimasukin ke dalam portfolio, ya.

Nah, jadi ini yang kita dorong, coba lakukan konsolidasi. Dan tentu konteksnya kalau bicara pangan, memang kita waktu itu bisa menyelesaikan Covid karena tentu payung hukumnya jelas. Nah, hari ini pangan seperti yang saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, dinamika kebijakan antara kementerian itu yang harus kita selaraskan.

Contoh misalnya ketika pupuk itu diturunkan dari 9,55 menjadi 4 eh 6,25. Itu tentu bukan keputusan kami, itu, tapi keputusan daripada berbagai pihak yang membuat keputusan itu. Nah, dinamikanya ini yang seperti inilah yang kenapa memang, kalau memang situasinya kita mau selesaikan seperti Covid, apalagi sekarang kita tahu Elnino ini akan berjalan cukup panjang dan ternyata Elnina-nya ini sedikit, jadi bukannya besar tapi hanya hujan 2 minggu dan berhenti lagi, sehingga akan terjadi juga di produksi, nanti di bulan Juni dan seterusnya. Nah, kompleksitas ini yang memang mau tidak mau, ya kita harus punya situasi-situasi bagaimana menyelaraskan daripada *blueprint* daripada pangan ini, tidak bisa hanya kami.

Kami sejak awal sudah mengusulkan yang namanya Bulog itu sebagai stabilisator, karena tidak mungkin peran Bulog seperti hari ini, yang misalnya ketika dia mesti operasi pasar, tetapi dia mesti pinjam dari Bank Himbara

dengan *interest*, walaupun kemarin pemerintah sudah mengeluarkan juga, *interest*-nya diturunkan sampai 3%. Tetapi *kan* kembali, ada payung hukum lainnya yang belum termasuk, ketika bagaimana mereka membuang ke pasar dengan harga yang lebih murah waktu mereka beli, apakah ini menjadi kerugian negara? Nah inilah kenapa kita dorong.

Nah, memang RNI, tadi salah satu kompleksitasnya yang sejak awal ketika kita masuk, RNI itu punya pabrik gula, punya pabrik kesehatan, punya macam-macam, ini ya kenapa kita akan sisir ulang ya, perlu waktu 2-3 tahun untuk konsolidasi RNI ini atau ID Food ini, selain juga menghapuskan daripada unit-unit yang memang tidak diperlukan di kemudian hari. Tapi saya sepakat, apakah peran RNI cukup signifikan ke depan? Kalau nanti Bulog menjadi stabilisator, saya rasa peran Bulog sudah cukup kuat, *gitu*. Dan sehingga RNI sendiri bisa dalam konteks yang berbeda tentunya ya. Karena ini *kan* situasi yang memang dinamika hari ini lakukan. Tetapi saya sepakat dengan Komisi VI, pangan harus menjadi sebuah keseriusan kita bersama-sama, sampai Oktober ini, karena memang situasi daripada globalnya sendiri tidak menguntungkan dan kita berharap ini kita bisa lakukan seperti kita juga sama-sama waktu itu menanggulangi khususnya situasi pada Covid, waktu itu.

Lalu untuk bagaimana coba mendeteksi daripada isu-isu korupsi yang ada. Ya memang kita tentu kita mendorong bagaimana ini lebih baik lagi. Kenapa waktu itu kita juga melahirkan yang namanya BUMN pertama kali yang adanya bisnis risiko atau risiko bisnis, yang selama ini di kementerian belum ada, di BUMN-BUMN juga belum ada, dan bahkan kita kemarin sudah meluncurkan bekerja sama bagaimana *internal control over financial reporting* ini kita sudah terapkan sekarang, dengan kita *me-mapping* seperti *fraud-fraud* apa yang sudah terjadi berulang-ulang kali dan ini yang kita data. Tetapi ini masih *internal control over financial report*, nah, ini yang kembali tadi tanya, bagaimana dengan *project*, bagaimana dengan investasi? Ya memang kita tidak cukup panjang tangannya, karena percuma ada komisaris dan direksi, kalau tidak bisa mengawasi *fraud* itu sendiri ya.

Contoh, misalnya kita bicara investasi, investasi kita tidak punya, payung atau kekuatan sampai operasional, sampai masuk ke operasional, nah hal-hal seperti ini yang saya rasa tentu ada keterbatasan yang memang kita harus carikan solusi, ya dan seperti misalnya untuk kasus Taspen sendiri, ketika kita berkoordinasi dengan pihak KPK dan komisaris utama, kita melihat bahwa, oh ini kasus investasi di tahun 2016 sampai 2019 pertengahan. Nah, ini, ini yang kita *ngelihat*, kasus apa, karena kalau sampai 2019 mungkin 2020 lah di zaman kita, mungkin kita akan bisa coba lebih cepat lagi. Cuman karena 2016-19 kita sedang konsolidasi data sekarang bersama pihak KPK, ini apa, karena investasinya *kan* waktu itu kita belum sampai situ, tetapi tidak mengurangi tadi, bagaimana penegakan hukum, makanya kita langsung mengambil tindakan, dan kita sekarang juga lagi berkoordinasi dengan tentu Menteri Keuangan sebagai juga pemangku terbesar untuk Asabri dan Taspen, itu.

Nah ini juga berlangsung untuk dana pensiun ke depan, ya memang seperti *roadmap*, kita ke depan kita melihat masih optimis kalau bisa kita menjadi 30 Badan Usaha Milik Negara saja ya, ya kita kurangkan lagi supaya kita fokus ke jenis-jenis yang memang kita harus hadir sebagai negara, tidak perlu semuanya ya. Kemarin sempat misalnya apakah BUMN perlu hadir di bisnis hotel, nah, ini juga menjadi dinamika tersendiri. Yang kita waktu itu jelaskan, memang waktu kita hadir, BUMN sudah banyak hotel, hari ini cuma kita konsolidasikan, bukan bikin hotel baru *gitu*.

Nah, inilah *planning-planning* yang saya rasa mungkin kita coba FGD-kan, jadi saya mengusulkan juga dua FGD sebenarnya untuk Komisi VI, satu, mengenai pangan, supaya ini konteksnya mengenai Bulog, pupuk, *financing*, pangan, semua bisa terkonsolidasi dan kita bisa tawarkan kepada komisi lain untuk mendukung atau kementerian lain untuk mendukung. Yang kedua, memang kita juga sedang bertahap bagaimana mengkonsolidasi BUMN-BUMN lagi yang memang sebenarnya apa perlu itu ada di BUMN, sebenarnya misalnya Airnav, Airnav itu perlu enggak di kita atau memang sebaiknya di Kementerian Perhubungan saja. Nah, atau memang kalau mesti masuk ya dia masuk ke InJourney. Nah, seperti-seperti ini mungkin hal-hal ini yang kita bisa lakukan, masih ada waktu saya rasa untuk kita lakukan untuk konsolidasi bersama-sama dengan Komisi VI.

Untuk lainnya kalau berkenan, saya coba nanti jawab tertulis, Pimpinan dan wakil Anggota yang terhormat, untuk bisa supaya lebih detail lagi jawabannya.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Pimpinan, saya tertarik yang nomor dua tadi itu Pak, Pak Menteri. Mungkin harus kita lakukan, sekarang ini awal tahun, yang nomor dua tadi itu, bagaimana *roadmap* daripada BUMN ini memang perlu kita *adjust* lagi ya, karena ke depan kita memang, perubahan ini tidak bisa kita hindari bersama *gitu loh*, jadi harus kita lakukan *adjust* terhadap BUMN-BUMN. Saya sangat setuju dengan hal tersebut sehingga pertumbuhan di lain pihak oleh swasta juga berkembang, BUMN sebagai penjaga daripada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas *growth with equity* itu benar-benar bisa terjadi.

Makasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Saya tertarik apa yang Pak Menteri katakan tadi, BUMN tangannya tidak cukup panjang untuk menjangkau ke persetujuan investasi yang

dilakukan oleh perusahaan BUMN. Pertanyaan saya, di mana fungsi komisaris di situ, Pak? Apakah komisaris itu memiliki juga apa namanya, wewenang atau apa ya, mempunyai fungsi untuk memberi persetujuan atau tidak? Karena kalau tidak, ini dirut ini memiliki kewenangan yang sangat luar biasa, di, karena ini duit ini bukan duitnya perusahaan dia *loh*, ini duit orang banyak. Beda kalau yang dia putuskan itu duitnya dia sendiri, kalau dana pensiun ini kan dana orang banyak, Pak, seharusnya tidak boleh diputuskan hanya dengan, ke investasi itu diputuskan hanya seorang dirut, bukan dana perusahaan ini, Pak, ini dana orang, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak, direspons *aja*.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Ya, tentu peran komisaris sebagai pengawasan operasional di direksi, biasanya mereka ada sistem komite-komite. Kalau kami, ada Komite Risiko, Komite Investasi, *gitu*. Kalau kami selalu belajar dari pengalaman dari Asabri dan Jiwasraya kemarin, kita hanya bisa meng-*advice* bahwa investasi mereka itu mesti jangka panjang dengan *return* yang baik, bukan *return* yang berapa belas persen, *toh* untuk risikonya harus lebih terjaga, nah, itu yang sudah kita usulkan. Tetapi penerapan di lapangan sendiri, *day to day* tadi, yang kita bilang kepanjangan tangan kita tidak sampai situ, karena itu memang bagian dari *operational governance* yang harus, yang mereka lakukan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pak Menteri.

Kalau saya *kan*, izin Pak Menteri. Saya kan selalu memahami komisaris itu kan sebagai wakil pemegang saham, pemegang sahamnya *kan* dikuasakan pada Kementerian BUMN. Saya selalu pada pikiran bahwa sebenarnya harusnya Kementerian BUMN yang bertanggung jawab. Dalam artian apa? Kalau saya melihat dari pengalaman saya dari 2014, itu jarang sekali Kementerian BUMN itu berdiskusi dengan komisaris, Pak, hampir tidak ada forum yang secara simultan mengundang mereka untuk *update*, segala macam, sangat jarang dalam pengalaman saya ya. Terlebih-lebih ketika komposisi dari komisarisnya itu juga yang sudah punya banyak kesibukan, satu, yang kedua, baca buku neraca keuangan juga belum tentu bisa.

Saya kira di sinilah fungsi asdep-asdep dan yang selain itu, saya kira, Pak, untuk per *cluster gitu* ya, secara reguler bertemu, Pak. Karena kadang-kadang begitu direksi sudah *oke* dengan kementerian, kadang komisaris itu juga cuma terima, Pak, karena enggak semua juga ini komisaris mau terlibat di Komite Audit, di Komite Resiko, apalagi berhubungan dengan SPI. Kadang-kadang kalau *udah* pejabat, malas, Pak, yang lain belum tentu *ngerti gitu*, jarang, malah ada yang bagian jadi persoalan, dari persoalan itu sendiri.

Jadi saran saya, Pak, buatlah forum yang regular dengan mereka, untuk mendapatkan *input-input*, tahu progres di dalam segala macam, Pak, sehingga kita bisa preventif sifatnya. Saya kira begitu, karena banyak juga kejadian justru komisarisnya lebih-lebih dari eksekutif, nah, ini bahaya juga.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Satu menit, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya segera mengakhiri rapat ini untuk mengambil kesimpulan.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Tiga puluh detik *deh*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalo saya buka, ini melebar lagi.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Sedikit, Pak, karena tadi menjawab pertanyaan saya.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Tiga puluh detik Pak, 30 detik, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Baik. Pak Erick, mungkin kalau saya melihat memang di sinilah celah lemahnya sistem pengawasan di Kementerian BUMN, jadi pada akhirnya ya seperti pemadam kebakaran *gitu* ya, sudah terjadi baru kemudian dilakukan tindakan. Oleh karenanya mungkin juga harus evaluasi ke dalam, apakah struktur yang ada di Kementerian BUMN, apakah struktur yang saat ini diberlakukan di kabinetnya Pak Erick, ataukah di kepengurusan sebelumnya, di kabinet sebelumnya, yang di situ ada struktur deputi misalkan, deputinya lebih lengkap, menjangkau terhadap BUMN-BUMN. Jadi menurut saya ini juga dijadikan evaluasi saja, sehingga tidak ada lagi tadi bahwa tangan BUMN tidak sampai *gitu* ya, sepanjang bahwa itu adalah menjadi tugas komisar. Pada sisi lain, komisar pun saya melihat memang tidak efektif untuk melakukan itu.

Terima kasih, Pak.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum.):

Interupsi sedikit, Pimpinan.

Menanggapi tadi yang disampaikan oleh Menteri BUMN terkait kasus di Taspen adalah kasus yang sudah cukup lama, kami memahami bahwa kasus itu adalah akumulasi dari kasus-kasus sebelumnya, bahkan sejak tahun 2009 ya, dari pertama kali saya ada di DPR RI.

Namun demikian, Bapak, kasus yang saat ini terjadi juga, ya kita nanti, makanya nanti, Pimpinan, saya mohon ada agenda khusus pembahasan tentang Taspen ini, sehingga dipilah mana kasus yang lama, mana kasus yang baru. Karena kalau kita lihat profil Antonius Kosasih, Nicolas, Antonius Stephanus Nicolas Kosasi diangkat sebagai Dirut PT Taspen oleh Kementerian BUMN pada awal Januari 2020 menggantikan Iqbal Lantaro. Artinya, yang sekarang lagi berkasus ini, yang diangkat di 2020, berarti *kan* ada, ada kasus baru atau bagaimana sehingga kami butuh kejelasan, tidak-tidak kemudian di *gebyah uyah* bahwa itu kasus yang lama.

Saya yakin, Bapak punya pengalaman tadi dengan yang di sebelahnya ini, senior kita, mengungkap Jiwasraya dan Asabri, pasti kita bisa lakukan bersama-sama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, nanti kita buat forum khusus saja ya, mengenai Taspen. Saya kira itu, Pak Menteri.

Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Menteri BUMN, teman-teman sekalian yang telah mengajukan pendalaman, dan Pak Menteri sudah merespons, saya akan menyampaikan *draft* kesimpulan rapat untuk kita setuju sebagai kesimpulan rapat pada hari ini, bisa ditampilkan?

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN terkait Evaluasi Kinerja BUMN, Progres Program Restrukturisasi BUMN, Perubahan Peruntukan BUMN Utama Karya Tahun Anggaran 2024 periode I, Konsultasi Rencana Privatisasi/*right issue* PT Wijaya Karya, Selasa, 19 Maret 2024.

1. Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kinerja Kementerian BUMN yang berhasil mengkonsolidasikan laba BUMN sebesar 292 triliun dan memberikan dividen pada tahun 2023 sebesar 81,2 triliun.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan, menerima penjelasan ya penjelasannya ya belum menyetujui ya, atas kinerja BUMN, serta rencana usulan dividen Tahun Anggaran 2024, usulan PMN Tahun Anggaran 2024, dan usulan PMN Tahun Anggaran 2025.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari alokasi pembiayaan cadangan investasi APBN 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Kereta Api Indonesia sebesar 2.000 miliar dalam rangka pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru.

2000 miliar berarti 2 triliun, 2 triliun dalam rangka pengadaan kereta api.
 - b. PT Utama Karya sebesar satu koma, 1,6 triliun dalam rangka penyelesaian ruas tol Palembang–Bitung, Betung.
 - c. PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar 1 triliun dalam rangka penguatan permodalan.
 - d. PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar 3 triliun dalam rangka pembelian kapal penumpang untuk rute perintis.
 - e. PT Industri Kereta Api sebesar 2 triliun dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.
 - f. PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar 1 triliun dalam rangka penguatan permodalan.
 - g. PT Bahana Pembina Utama Indonesia sebesar 3 triliun dalam rangka penguatan permodalan penjaminan KUR.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Pimpinan, ini ada dua yang rapor merah *nih* di sini.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti catatan *aja*.

F-PDIP (Prof . Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Iya rapor merah *loh* ini.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti masih kita dalami, Pak.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Yang ngomong menteri sendiri. *Loh* ini tadi menerima penjelasan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Enggak *kan* ini, dari Kementerian BUMN, Pak, halaman 7, Pak. Iya, nanti kita akan dalam iya. Dari kementerian, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan ke-4,

4. Komisi VI DPR menerima penjelasan dari Kementerian BUMN untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN dan akan dibahas dalam masa sidang berikutnya.

Itu di halaman 7.

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan ke-5,

5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN dan akan mendalami perubahan alokasi PMN Tahun Anggaran 2024 PT Utama Karya sebesar 18,6 triliun, 18,604 triliun, yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap I yang mengalami perubahan dari 6,104 triliun menjadi 5,177 triliun; kemudian,
 - Pembangunan ruas tol Kayu Agung–Palembang–Betung yang berubah dari 10 triliun menjadi 13,427 triliun.

Ini masih akan didalami ya, sudah pernah didalami *kan*? Sudah ketok, ini hanya perubahan, ya. Menerima penjelasan perubahan *aja* ya. Kalau ini sudah diketok *kok*, tentang ya, dapat menerima *aja*, pendalamannya sudah, "...dapat menerima penjelasan dari Kementerian BUMN dan akan mendalami...", sudah, karena sudah pernah didalami.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Bimo, ini kan perubahan 2024 ya? Nah, kalau perubahan 2024 ini mau dipakai di 2024 *kan*?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Nah, berarti ini apakah, ya idealnya adalah persetujuan sebetulnya, tergantung Pak Erick, Pak Erick bisa *state* lagi bahwa minta persetujuan ini, *gitu*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Persetujuan, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya, saya kira karena ini cuman geser *aja*, Pak, jadi menurut saya persetujuan, memang.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dapat menerima atau menyetujui. Komisi VI DPR RI menyetujui, sudah, “dapat” nya hilang.

6. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian BUMN untuk melanjutkan restrukturisasi PT Waskita Karya dalam menyelesaikan kewajiban hutang korporasi.

Pak Menteri, apa ini, iya nih hilang, atas tadi, atas, enggak usah tadi sudah. 6 hapus, hapus, nanti *kan* di atas, *oke*.

6. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN terkait inisiatif aksi korporasi PT Wijaya Karya akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi *right issue* sesuai dengan persetujuan PMN Tahun Anggaran 2024 sebesar 6 triliun.

Kita menyetujui ya? Masih mau? Menyetujui, nanti pendalaman karena ini menyangkut *right issue* ke FGD, Pak ya, *udah* ya? menyetujui *kan*? ya sudah yang kedua, oke sudah kita bahas. Pak, kita sudah bahas kemarin? Ini pembahasan tanggal berapa ini? *Oke*, karena kita sudah pernah menyetujui PMN-nya, akibatnya adalah *right issue* ini ya, jadi kita menyetujui ya, *oke*.

Komisi VI DPR RI menyetujui aksi korporasi PT Wijaya Karya, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sudah tadi, sudah *tak* bacakan tadi. Masih ada yang ditanyakan nomor 6? *Right, right issue*, 6 triliun *kan* PMN? *right issue*-nya 3 koma.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

“Korporasi PT Wijaya Karya melalui *right issue* senilai”, *gitu kan*, senilai 3,2 triliun untuk mela, itu koma, Tbk, untuk melakukan *right issue*, buang *udah*, itu buang langsung, sebesar

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebesar 3,2

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

udah, udah benar, right issue aja, ya sudah, oke.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Komisi VI DPR RI menyetujui aksi korporasi PT Wijaya Karya untuk melakukan *right issue* sesuai dengan persetujuan, enggak, cukup, *right issue* sesuai dengan persetujuan PMN Tahun Anggaran 2024 sebesar 6 triliun. Kalau lebih besar,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Right issues, ini sama dengan affair dan affairs.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

7. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam permasalahan yang ada di PT Taspen.

Setuju, Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperbaiki kinerja BUMN lain, kinerja BUMN lain, sehingga dividen yang dihasilkan oleh BUMN tidak hanya bergantung pada BUMN tertentu saja.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Pimpinan, bentar dulu, Pimpinan. Kalau ini masalah deviden digenjut, ini akan menjadi bisa jadi nanti akhirnya strateginya malah berkembang terus ini BUMN, mengembangkan BUMN ini, kalau mengembangkan BUMN,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini usulan siapa *nih*?

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Kalau mengembangkan, kalau mengembangkan BUMN, artinya akan mempersempit swasta, pergerakan swasta. Kita mau jadi sosialis atau mau jadi tetap kita di posisi yang sekarang ini? Makanya, jadi kita, kita harap ini bukan dividen, mungkin kinerja saja barangkali, lebih bagus, jadi bukan dividen.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kan udah kinerja. Kinerja kan ujungnya dividen, Pak, itu kan sudah disebut kinerja.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Belum, kalau saya malah bukannya dividen, bilamana perlu, tidak ada dividen, tapi dia bisa membangun perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan *growth equity* itu, itu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional dan BUMN juga sebagai instrumen penerimaan negara.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Iya, tapi lebih, lebih kepada *agent of development*. Kalau ini ditekankan ke dividen, bisa saja menjadi dividen yang ditekankan, tapi dia akan mengembangkan usahanya segala macam ini, yang tentunya akan, akan mengurangi kesempatan swasta, maka saya bilang, lebih baik kinerja saja dulu *gitu*. Nanti kan akan dipaparkan, kemarin itu tadi Pak Menteri *ngomong*, akan memaparkan *roadmap* dari ada BUMN ke depan, yang poin nomor dua tadi yang dijelaskan oleh Pak Menteri itu, ini harus ini, mungkin kinerja saja dulu, jangan dividen ini.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Kalau BUMN dihapus, liberal *dong* negara ini.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Bukan, kalau yang saya tahu itu BUMN saya terangkan tadi, mungkin Pak Herman lagi kurang perhatikan tadi, bahwa menurut saya aturan dari BUMN itu berdiri, ada empat.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Intinya bahwa Pak Demer minta kinerja BUMN.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tidak dalam kaitan kinerja itu diukur dari setor dividen.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Dividen, betul.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tapi bagaimana BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya tetap dividen harus masuk *dong*,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya tetap, tetap sama, karena ukurannya dia lari ke sana.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Karena *pake* istilah negara.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Kalau, kalau cuma memperbaiki kinerja *kan* normatif sekali.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Yang dimaksud dengan poin 8 ini, ini *kan* sebenarnya bagaimana yang, *ngasih* dividen itu perusahaannya enggak itu-itu aja, maksudnya itu. Bagaimana kita mampu mendorong perusahaan BUMN-BUMN lain meningkatkan kinerjanya sehingga punya *performance* yang baik seperti yang lain yang sudah, yang memang terbukti memberikan dividen itu *gitu*, maksudnya *kan* itu, meningkatkan kinerja dari yang lain *gitu*.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Kalau BUMN kinerjanya meningkat ya dividennya meningkat,

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ya tapi kita mau mengisi pundi BUMN apa menuju pertumbuhan, itu *aja* sekarang ini ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk kali ini kalau kita.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Saya, saya terus-terang melihat *gini* ya, BUMN ini *kan* sebenarnya ketika dia itu berdiri itu, tadi saya terangkan juga,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya minta dicabut dulu *aja* kesimpulan ini, tarik *aja* dulu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Enggak, saya kira kesimpulan ini *kan* menyatakan supaya memberikan dividen itu jangan hanya Himbara plus beberapa BUMN lain, itu. Karena BUMN ini *kan* ada dua, Pak, satu memang harus menghasilkan *profit*, yang kedua, untuk tugas-tugas yang dibebankan oleh negara *gitu loh*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke sebentar, kami persilakan Pak Menteri, dengan kesimpulan nomor 8 ini.

Oke, iya Komisi VI,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRİ HANTERU SITORUS, M.A.):

Mohon maaf, Pak. Izin, Pimpinan.

Ini lebih spesifik, kita mau jumlah BUMN yang memberikan dividen tidak hanya itu lagi, itu lagi, itu Pak Menteri. Iya, menambah jumlah BUMN yang mampu memberikan dividen.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ya nanti akan dipaparkan, *kan* tadi janji ada dua pemaparan dari Pak Menteri ya, tadi itu dua, yang nomor dua tadi itu adalah janji akan memaparkan tentang kinerja BUMN melalui *roadmap*-nya nanti, berarti kita di sana, di sana *aja* nanti.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup ya? Ada dua persepsi, kinerja, perbaikan kinerja BUMN dari cara pandang meningkatnya pemberi dividen dari beberapa BUMN, tidak hanya yang itu-itu saja. Tapi satu pihak, Pak Demer juga melihat bagaimana kinerja peningkatan kinerja BUMN tidak hanya dilihat dari aspek dividen, dua-duanya.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Kalau *gitu nggak* perlu nomor 8, Pak, itu *kan* normatif sekali, bahwa Pak Menteri harus meningkatkan kinerja ya memang dibayar untuk itu *kan*.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya harus ada targetnya, kalau kinerja ya pertama *profit*, yang kedua dividen.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ya enggak juga, kalau BUMN bukan di situ. Kalau saya lihat BUMN adalah tugasnya bagaimana menjadi *agent of development*, kalau tugas

menjadi *agent of development* itu biasanya itu ada empat hal, satu itu adalah dia.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ini, ini *kan* soal ideologis *nih* kalau menurut saya, kalau saya tidak serta-merta dengan bertumbuhnya BUMN akan mematikan swasta. Kalau *nunggu* swasta itu, enggak ada jalan tol yang dibangun, Pak, apakah akan berarti kalau BUMN-nya bagus, menghasilkan dividen, maka swasta enggak bisa bergerak?

Kita mengalami puluhan tahun sebelum apa namanya, sebelum era Pak Jokowi, bagaimana mereka justru jadi benalu, ini urusannya panjang, ini ideologis. Jadi kalau menurut saya, persoalan kita adalah bagaimana yang memberikan dividen itu lebih banyak, saya kira di situ. Soal bagaimana kita menempatkan swasta dalam konteks kehadiran BUMN, itu kita bicarakan, itu menurut saya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ya memang kalau.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masih ada dua persepsi, yang ini saya *drop* dulu. Kita ke kesimpulan di bawahnya, *drop* dulu, *drop* dulu, ya.

8. Komisi VI meminta pada, Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperbaiki penempatan direksi maupun komisaris sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Normatif ya, buang normatif.

6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengevaluasi efektivitas dan peningkatan kinerja BUMN yang mendapatkan PMN.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Mas.

Kalau saya lebih tertarik agar nanti kita beri tenggat waktu *nih*, katakanlah semester atau 1 tahun, PMN yang diberikan itu juga kita harus kunjungi *loh*, Pak, kita harus dapat laporan juga sudah ini, ini *kan* kita enggak pernah *nih*, 4 tahun kasih PMN terus, kita jarang, hampir enggak pernah lihat *project*-nya, hampir tidak pernah mendapat laporan terinci untuk PMN-nya, bukan secara global.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi, jadi *gimana?* kita sudah mau mengambil kesimpulan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya memberikan apa, ini *kan* kementerian ya, Kementerian BUMN *gitu* ya siapa pun nanti menterinya, *kan* memberikan laporan evaluasi terhadap.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Langsung *aja*, Pak, *gimana?* Komisi VI DPR RI meminta.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Untuk memberikan laporan evaluasi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk memberikan laporan evaluasi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Penggunaan dana BUMN oleh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Penggunaan dana BUMN, eh PMN *dong*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

PMN, iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Penggunaan dana PMN, terus?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Laporan evaluasi penggunaan dana, dana PMN.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Titik?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kan enggak per, per *item*, biasanya *kan* per global, misalnya HK *nih* kita kasih 10 Triliun mana pernah kita bicaranya yang 10 triliun itu jadi apa. Ini kita mau secara spesifik, supaya kita bisa evaluasi, *kan* ke sana.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

“Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memberikan laporan evaluasi penggunaan dana PMN,” titik ya, *kan*.

Komisi VI DPR RI.

9. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk terus melakukan transformasi BUMN secara berkelanjutan sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN lebih baik pada periode-periode selanjutnya.

Wah normatif banget ini, hilang.

9. Komisi VI DPR meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengkonsolidasikan BUMN terkait pangan, seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Perum Bulog untuk berperan lebih, untuk berperan lebih dalam mengatasi krisis pangan dan dalam rangka membangun kedaulatan pangan.

WAKIL KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Itu maksudnya mengonsolidasikan apa ya?

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Stakeholdernya ada di PTPN,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Hulu hilirnya ada di BUMN, itu rapat dari kemarin sebenarnya.

WAKIL KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mengkonsolidasikan ini bisa disuruh merger ini.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mensinergikan, mensinergikan,

WAKIL KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya mungkin mensinergikan lah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mensinergikan *aja*.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Krisis itu belum dijawab.

WAKIL KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini *kan* nunggu arahan presiden baru ini, yang akan bertanya kepada Pak Menteri BUMN yang ini juga.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

9. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mensinergikan BUMN terkait, BUMN terkait pangan seperti ID Food, Pupuk Indonesia, Perum Bulog, untuk lebih berperan dalam mengatasi krisis pangan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

PTPN enggak masuk ya?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

PTPN, PTPN, Pak.

Teman-teman, ini merupakan *follow up* juga dari rapat kemarin,

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

mensinergikan dan mengoptimalkan,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

mensinergikan dan mengoptimalkan, mengoptimalkan, terutama teman-teman ini tadi merespons dari kawan-kawan bagaimana juga mengatasi situasi *problem* faktual hari ini, mengenai kelangkaan dan tingginya harga pangan.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ini krisis, krisis pasokan gas bumi belum itu, ke industri.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kalau yang terkait PN Gas (suara tidak jelas)

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup ya? "... berperan dalam mengatasi krisis pangan dan membangun kedaulatan, dalam rangka membangun kedaulatan pangan".

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Pimpinan, itu krisis pasokan gas bumi ke industri belum dijawab, itu bahaya juga itu, deindustrialisasi itu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Yang mana, di poin berapa?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Eenggak, situ kalo mau buat kesimpulan di *taro* sini coba, Pak. Ini *kan* nampung usulan teman-teman, dibuat *aja* kesimpulan, serahkan ke belakang, Pak.

“Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mensinergikan dan mengoptimalkan BUMN pangan, seperti PT Rajawali Nusantara, ID Food, PT Pupuk Indonesia, PT Perkebunan Nusantara dan Bulog untuk berperan lebih dalam mengatasi krisis pangan dan membangun,

kok dan membangun kok, *kalimate* diresapi *to* Mas, dalam rangka membangun kedaulatan pangan, dan menjaga kedaulatan pangan”.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian,

10. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan program listrik pedesaan, PT PLN.

Komisi VI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan program listrik pedesaan, PT PLN.

siapa tadi ini ya, oh ya, Pak Harris Turino.

11. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mendorong BUMN Himbara untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan penyelesaian kredit macet UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus tagih.

Silakan, Pak.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Mekanismenya *gimana* itu?

DEPUTI BID. HUKUM DAN PUU KEMENTERIAN BUMN RI (ROBERTUS BILLITEA):

Ya mohon maaf Bapak Pimpinan, kalau boleh ini ditambahkan, dengan “terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya”, karena mereka tidak bisa dengan berkoordinasi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

“dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya”.

DEPUTI BID. HUKUM DAN PUU KEMENTERIAN BUMN RI (ROBERTUS BILLITEA):

Ya, ada Kemenkeu, ada,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena ini kan terlalu cepat disampaikan dari presiden ke bawah, belum jalan, Pak, jadi buat kebingungan enggak karu-karuan.

“Komisi VI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mendorong BUMN Himbara untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan penyelesaian kredit macet UMKM”.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Mungkin meminta Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan para *stakeholders* dalam rangka penghapusbukuan itu, Mas, karena *kan* tidak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

“Melalui kebijakan hapus buku dan hapus tagih dengan berkonsultasi?, berkoordinasi”, enggak ada konsultasi, dengan berkoordinasi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Dan konsultasi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dan konsultasi?

DEPUTI BID. HUKUM DAN PUU KEMENTERIAN BUMN RI (ROBERTUS BILLITEA):

Lebih banyak berkoordinasi biasanya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

... dengan kementerian dan lembaga lainnya, cukup?

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

“Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait dengan penuntasan, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait”, ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

“Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait penyelesaian dan,” penyelesaian, upaya apa? Enggak ada upayanya.

“Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait penyelesaian kredit macet UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus tagih”, oke?

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Pimpinan, saya tambah satu, tambah satu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya ketok dulu, Pak.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ya, ya, *oke*, silakan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

(RAPAT:SETUJU)

Silakan, Pak.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Kementerian, eh “Komisi VI meminta kepada Kementerian BUMN berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk menyelesaikan krisis pasok gas alam untuk industri, untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi”. Ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk...

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Kementerian lainnya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak, untuk?

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan krisis pasok gas alam untuk industri untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Sudah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk mencegah terjadi deindustrialisasi. Untuk mencegah terjadinya, ya, Pak, ya.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Iya, terjadinya deindustrialisasi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

12. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi;

(RAPAT:SETUJU)

Dan tiga belas, kelangkaan gas untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi. Oke.

(RAPAT:SETUJU)

13. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis yang belum direspons di forum ini dalam waktu 5 hari kinerja, 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

MENTERI BUMN RI (Dr. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Pimpinan, yang 292 itu *unaudited* ya, yang pertama ya, 292 itu, takutnya nanti persepsinya *audit* itu, *unaudited* masih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, 292 triliun, *unaudited*.

Sebelum kami tutup, terlebih dahulu kami persilakan Saudara Menteri BUMN untuk menyampaikan *closing statement*, cukup?

**Bapak, Ibu, dan
Hadirin yang saya muliakan,**

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia beserta jajarannya.

Atas nama Pimpinan Komisi VI kami menyampaikan ucapan terima kasih, juga kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI dan para tamu undangan serta hadirin sekalian, yang telah mengikuti rapat dari jam 11 sampai jam 3 dalam tentunya suasana Ramadhan yang tentunya kawan-kawan cukup menahan lapar dan telah mengikuti rapat hingga selesai.

Dengan demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.10 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001